



**ANALISIS MAQASHID SYARI'AH TERHADAP  
KEPERCAYAAN DAN PARTISIPASI JAMAAH MASJID**

**TESIS**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S2) dan mencapai gelar Magister Akuntansi

Oleh :

**RIZA RAMADHAN**

**NIM 160820301022**

**MAGISTER AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2019**

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucap Alhamdulillah tesis ini saya persembahkan sebagai bentuk tanggungjawab, bakti, dan ungkapan rasa terima kasih saya kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Khabibur Rahman dan Ibunda Rifatil Alimah;
2. Adikku tersayang, Atillah Rahman;
3. Seluruh anggota keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan;
4. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi;
5. Teman-teman S1 Akuntansi 2009, S2 Akuntansi 2016;
6. Semua yang terlibat baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam pengerjaan tesis ini;
7. Almamater Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

## MOTTO

“Minta tolonglah (kepada Allah SWT untuk mencapai cita-citamu) dengan sifat sabar dan shalat. Dan sesungguhnya shalat itu berat sekali, kecuali bagi orang-orang yang khusuk”

**(QS. Al-Baqarah 45)<sup>\*)</sup>**

Berpikir tanpa bertindak sia – sia, bertindak tanpa berpikir sangat berbahaya.

**(Soekarno)**

Sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang diamankan, sebaik-baik harta adalah harta yang disedekahkan, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat.

**(Ippo “Right” Santoso)**

Jika kamu pernah berada di atas dan juga berada di bawah, maka kamu akan menjadi lebih bijaksana.

**(Riza Ramadhan)**

---

<sup>\*)</sup>Departemen Agama Republik Indonesia. 1990. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Mahkota Surabaya.

## PERNYATAAN

Nama : Riza Ramadhan  
NIM : 160820301022  
Jurusan/Prodi : Akuntansi/ Magister Akuntansi  
Judul Tesis : Analisis Maqashid Syari'ah Terhadap Kepercayaan dan Partisipasi Jamaah Masjid

Menyatakan bahwa tesis yang telah saya buat merupakan hasil karya sendiri. Apabila ternyata dikemudian hari tesis ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan dan menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan yang saya buat ini tidak benar.

Jember, 28 Januari 2019

Yang menyatakan,

**Riza Ramadhan**

**NIM 160820301022**

**TESIS**

**ANALISIS MAQASHID SYARI'AH TERHADAP KEPERCAYAAN DAN  
PARTISIPASI JAMAAH MASJID**

Oleh

Riza Ramadhan  
NIM 160820301022

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Whedy Prasetyo, SE, MSA, Ak

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Agung Budi Sulistyono, SE, M.Si, Ak

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : Analisis Maqashid Syari'ah Terhadap Kepercayaan dan Partisipasi Jamaah Masjid

Nama : Riza Ramadhan

NIM : 160820301022

Jurusan/prodi : Akuntansi/ Magister Akuntansi

Disetujui Tanggal : 04 Desember 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Whedy Prasetyo, SE, MSA, Ak**  
NIP. 197705232008011012

**Dr. Agung Budi S, S.E, M.Si, Ak**  
NIP. 197809272001121002

Mengetahui,  
Ketua Program Studi S2 Akuntansi

**Dr. Siti Maria Wardayati, M.Si, Ak**  
NIP. 196608051992012001

## PENGESAHAN

Tesis berjudul “Analisis Maqashid Syari’ah Terhadap Kepercayaan dan Partisipasi Jamaah Masjid” karya Riza Ramadhan telah diuji dan disahkan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 07 Januari 2019

Tempat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Tim Penguji  
Ketua,

**Dr. Muhammad Miqdad, SE, MM,**

NIP. 197107271995121001

Anggota I

Anggota II,

**Dr. Siti Maria Wardayanti, M.Si., Ak**

NIP. 196608051992012001

Anggota III,

**Dr. Yosefa Sayekti, M.Com, Ak**

NIP. 196408091990032001

Anggota IV,

**Dr. Whedy Prasetyo, SE, MSA, Ak**

NIP. 197705232008011012

**Dr. Agung Budi Sulistiyo, SE, M.Si, Ak**

NIP. 197809272001121002

Mengesahkan  
Dekan

**Dr. Muhammad Miqdad, SE, MM, Ak**

NIP. 197107271995121001



## RINGKASAN

**Analisis Maqashid Syari'ah Terhadap Kepercayaan dan Partisipasi Jamaah Masjid;** Riza Rmadhan, 160820301022; 2019: 106 halaman; Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

*Maqashid syari'ah* terdiri dari lima aspek hukum islam yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Lima pokok Maqashid syariah ini akan diproksi dengan pengendalian internal, akuntabilitas dan transparansi. Pengendalian internal merupakan cara bagi entitas atau organisasi untuk menjaga asetnya, hal ini jelas sesuai dengan pokok kelima dari maqashid syariah yaitu *Hifdz Al-Maal* atau memelihara harta. Untuk itulah pengendalian internal menjadi salah satu proksi dari maqashid syariah. Proksi selanjutnya adalah akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas dan transparansi bisa diartikan dengan tanggung jawab dan kejujuran, hal ini jelas sesuai dengan pokok tujuan maqashid syariah yang kedua yaitu *Hifdz An-Nafs* atau memelihara jiwa. Pokok tujuan maqashid yang pertama yaitu *Hifdz Ad-Din* atau memelihara agama juga dapat dikaitkan dengan akuntabilitas dan transparansi. Penelitian ini menguji pengaruh pengendalian internal, akuntabilitas dan transparansi terhadap kepercayaan dan partisipasi jamaah masjid.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis dan menguji pengaruh variabel Sistem Pengendalian Internal, akuntabilitas dan transparansi terhadap kepercayaan jamaah dan partisipasi jamaah. Analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari analisis deskriptif untuk melihat gambaran karakteristik populasi dan analisis jalur. Analisis jalur digunakan untuk pengujian hipotesis dengan menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM). Populasi dalam penelitian ini adalah jamaah dari seluruh masjid besar yang berada di Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam penelitian ini sebagai unit analisisnya berjumlah 125 jamaah dari 5 masjid besar yang berada di Kabupaten tersebut. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode quota sampling.



Berdasarkan hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pengendalian internal terhadap kepercayaan jamaah adalah tidak signifikan. Pengaruh akuntabilitas terhadap kepercayaan jamaah adalah tidak signifikan. Pengaruh transparansi terhadap kepercayaan jamaah adalah signifikan. Pengaruh pengendalian internal terhadap partisipasi jamaah adalah tidak signifikan. Pengaruh akuntabilitas terhadap kepercayaan jamaah adalah signifikan. Pengaruh transparansi terhadap kepercayaan jamaah adalah tidak signifikan.



**SUMMARY**

**Analysis of Maqashid Sharia against Trust and Participation of Mosque Jamaah;** Riza Ramadhan, 160820301022; 2019: 106 pages; Master of Accounting Faculty of Economics and Business, University of Jember.

*The Maqashid Sharia* consists of five aspects of Islamic law, namely maintaining religion, maintaining the soul, maintaining reason, guarding offspring and protecting property. These five Islamic Maqashid principles will be proxied by internal control, accountability and transparency. Internal control is a way for an entity or organization to safeguard its assets, this is clearly in accordance with the fifth point of maqashid sharia namely *Hifdz Al-Maal* or maintaining property. For this reason, internal control is one of the proxies of Maqashid Syariah. The next proxy is accountability and transparency. Accountability and transparency can be interpreted with responsibility and honesty, this is clearly in accordance with the main purpose of the second maqashid sharia, *Hifdz An-Nafs* or maintaining the soul. The main purpose of the first maqashid, *Hifdz Ad-Din* or maintaining religion, can also be attributed to accountability and transparency. This study examines the effect of internal control, accountability and transparency on the trust and participation of mosque worshipers.

This study uses a quantitative approach . The quantitative approach is used to analyze and examine the influence of Internal Control System variables , accountability and transparency on the beliefs of pilgrims and the participation of pilgrims. The quantitative analysis used in this study consisted of descriptive analysis to see an overview of population characteristics and path analysis. Path analysis is used to test hypotheses using *Structural Equation Modeling* (SEM). The population in this study were pilgrims from all major mosques located in Lumajang Regency, Jember Regency, Situbondo Regency, Bondowoso Regency and Banyuwangi Regency, East Java. D nature of this study as the unit of analysis amounted to 125 pilgrims from five large mosque located in the District. The sampling technique in this study uses the quota sampling method.

Based on the results of the analysis of the study shows that the influence of internal control over the beliefs of pilgrims is not significant. The effect of accountability on the trust of pilgrims is insignificant. The influence of transparency on the beliefs of pilgrims is significant. The influence of internal control on the participation of pilgrims is not significant. The influence of accountability on the trust of pilgrims is significant. The effect of transparency on the beliefs of pilgrims is insignificant.



## PRAKATA

Alhamdulillah, segala puji saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufik dan hidayah Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan tesis dengan judul “Analisis Maqashid Syariah Terhadap Kepercayaan dan Partisipasi Jamaah”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata dua (S2) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Penulis menyadari bahwa tidak sepenuhnya penulis dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, bantuan dan pelayanan yang telah diberikan demi kelancaran penyelesaian tesis ini, terutama kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S.E, M.M, Ak, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember sekaligus dosen penguji ketua;
2. Ibu Dr. Siti Maria Wardayati, M.Si, Ak selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember sekaligus dosen penguji anggota;
3. Ibu Dr. Yosefa Sayekti, M.Com, Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi sekaligus selaku dosen penguji anggota;
4. Bapak Dr. Whedy Prasetyo, SE, M.SA, Ak, selaku dosen pembimbing I yang sabar dan tulus memberikan bimbingan, saran, dan kritik;
5. Bapak Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E, M.Si, Ak selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis. Terimakasih atas semua ilmu dan nasihat yang diberikan;
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah bersedia membagi ilmu pengetahuan untuk penulis;
7. Pihak Akademik, Perpustakaan, dan Tata Usaha di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah membantu dalam proses penyelesaian tesis ini;

8. Seluruh anggota keluarga besar yang telah memberikan do'a dan dukungan yang tak terbatas;
9. Teman-Teman Magister Akuntansi Kelas A, terimakasih atas bantuan, motivasi dan semangatnya dalam proses penyelesaian tesis ini;
10. Teman-Teman Magister Akuntansi angkatan 2016;
11. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan hidayah Nya kepada semua pihak yang telah membantu hingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik karena keterbatasan ilmu yang dimiliki maupun kesalahan dari pihak pribadi. Demikian, semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi almamater tercinta, serta bagi pembaca pada umumnya.

Jember, 28 Januari 2019

Penulis

**DAFTAR ISI**

<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	11
2.1 Syariah Enterprise Theory (SET).....	11
2.2 Teori Pemangku Kepentingan.....	12
2.3 Theory of Reasoned Action (TRA).....	14
2.4 Teori Ilmu Sosial Profetik.....	14
2.5 Maqashid Syariah.....	15
2.6 Pengendalian Internal.....	20
2.7 Akuntabilitas .....	22
2.8 Transparansi .....	24
2.9 Kepercayaan.....	26
2.10 Partisipasi .....	27
2.11 Penelitian Terdahulu .....	27
2.12 Pengembangan Hipotesis .....	29
2.13 Kerangka Konseptual.....	36
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN</b> .....	38
3.1 Rancangan Penelitian.....	38
3.2 Populasi, Besar Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	38
3.3 Variabel Penelitian.....	39
3.4 Instrumen Penelitian.....	42
3.5 Lokasi Penelitian.....	43
3.6 Prosedur Pengumpulan Data.....	44
3.7 Teknik Analisis Data.....	44
3.8 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen.....	44



3.9 Uji Asumsi SEM .....	45
3.10 Penilaian Model Fit .....	45
3.11 Langkah – Langkah Analisis SEM .....	47
<b>BAB 4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
4.1 Gambaran Umum Sekilas Obyek Penelitian.....	53
4.2 Analisis Data .....	58
4.3 Uji Normalitas .....	58
4.4 Uji Kecocokan Model .....	60
4.5 Mengevaluasi Model Pengukuran.....	64
4.6 Uji Validitas .....	64
4.7 Uji Reliabilitas .....	66
4.8 Analisis Model Struktural .....	71
4.9 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis .....	73
<b>BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>83</b>
5.1 Kesimpulan .....	83
5.2 Implikasi Penelitian.....	86
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	87
5.4 Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
LAMPIRAN 1.1 KUESIONER PENELITIAN.....	97
LAMPIRAN 1.2 Goodness-of-Fit Statistics .....	100
LAMPIRAN 1.3 Hasil Pengujian LISREL.....	102



**DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 <i>Test of Univariate Normality for Continuous Variables</i> .....	58
Tabel 4.2 <i>Test of Multivariate Normality for Continuous Variables</i> .....	59
Tabel 4.3 <i>Test of Univariate Normality for Continuous Variables</i> .....	59
Tabel 4.4 <i>Test of Multivariate Normality for Continuous Variables</i> .....	60
Tabel 4.5 Hasil uji kecocokan model .....	60
Tabel 4.6 Nilai <i>t</i> , <i>error</i> dan <i>loading faktor</i> .....	64
Tabel 4.7 Nilai <i>standarized loadings</i> .....	65
Tabel 4.8 <i>Squared multiple correlations for y – variables</i> .....	66
Tabel 4.9 <i>Squared multiple correlations for x – variables</i> .....	66
Tabel 4.10 Pengaruh antara variabel laten eksogen terhadap endogen...	71
Tabel 4.11 Koefisien determinan ( $R^2$ ) .....	72

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Diagram Jalur Lengkap dengan Outer Model .....	37
Gambar 3.1 langkah-langkah dalam analisis dengan SEM.....	48
Gambar 3.2 Model struktural pada analisis SEM .....	49
Gambar 3.3 Diagram jalur lengkap.....	51



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai hukum Tuhan, Al-Qur'an mengandung konsep hukum yang unik. Konsep hukum dalam Al-Qur'an tentunya memiliki karakteristik yang ideal dalam mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Demikian juga hadist sebagai penjelas terhadap al-Qur'an mengandung aturan-aturan hukum syari'ah yang pada dasarnya mengarah kepada kepentingan manusia (Jamaa, 2013). Shidiq (2018) menyatakan bahwa tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah *Maqashid al-syari'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. *Maqashid Syari'ah* merupakan tujuan-tujuan umum yang ingin diraih oleh syari'ah dan diwujudkan dalam kehidupan. Betapa pentingnya *maqashid syari'ah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *maqashid syari'ah* sebagai ilmu yang harus dipahami oleh *mujtahid* yang melakukan *ijtihad*. Adapun inti dari teori *maqashid syari'ah* adalah untuk *jalb al-masahalih wa daf'u al-mafasid* atau mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, menarik manfaat dan menolak madharat. Maka istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat (Febriadi, 2017).

Anindhyta (2017) menyebutkan bahwa kemakmuran masjid merupakan kewajiban. Hal ini telah tertulis di dalam Al-Qur'an surat at-Taubah: 18 yang artinya: "hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk."

Masjid sebagai salah satu tempat suci bagi umat islam selain digunakan sebagai tempat beribadah juga mengelola dana umat yang yang diperoleh dari infak, sedakah dan sumbangan lainnya dari jamaahnya. Sebagai entitas keagamaan tentunya pengelolaan dana masjid harus dilakukan untuk memenuhi kemaslahatan

umat atau sesuai dengan inti dari *Maqashid Syari'ah*. Untuk melakukan hal tersebut masjid dalam mengelola dana umat harus melaporkan dan mencatatkan pengelolaan dananya dengan baik dan benar. Hal ini tentunya menjadikan masjid dalam melakukan pengelolaan dana umat juga harus menggunakan disiplin ilmu seperti akuntansi, manajemen atau disiplin ilmu lain yang menunjang sehingga dapat memenuhi konsep *Maqashid Syari'ah*.

Pengembangan ilmu akuntansi dan prakteknya sudah semakin berkembang dan memasuki ranah tempat peribadatan. Tentunya akuntansi dalam tempat ibadah terutama masjid sangat penting untuk dilakukan karena dana yang dikumpulkan lembaga-lembaga peribadatan sebagian besar atau kalau tidak semuanya berasal dari sumbangan umat. Masyarakat perlu untuk mengetahui apakah sumbangan yang mereka telah digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Meskipun dalam masyarakat secara tidak langsung sudah mempercayai pengelolaan dana tersebut, tidak dimungkinkan dana tersebut digunakan atau dipakai untuk kepentingan yang lain. Untuk itu perlu adanya pencatatan yang sistematis dalam hal ini pencatatan akuntansi terhadap pengelolaan dana umat tersebut. Namun tidak hanya pencatatan saja yang harus dikembangkan, model dan sistem tata kelola masjid juga harus menjadi perhatian untuk memastikan kepada jamaah yang menyumbang ke masjid bahwa tata kelola dari masjid tersebut sudah baik sehingga dapat mengelola dana sumbangan tersebut.

Di Islam sendiri sebenarnya praktek untuk melakukan pencatatan yang sistematis sudah di ajarkan dan terdapat dalam Al Qur'an. Allah SWT melalui Al Quran surat Al Baqarah 282 berfirman: "Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan". Simanjuntak (2011) menyebutkan bahwa dalam penggalan ayat tersebut terkandung suatu anjuran yang mendorong Islam untuk melaksanakan praktek akuntansi dalam lingkungan bisnis. Sedangkan seperti yang sudah disebutkan, bahwa sebagian besar dana dari tempat ibadah adalah dana umat yang seharusnya lebih ditekankan untuk kemaslahatan umat sesuai dengan inti dari

*Maqashid Syari'ah*. Meskipun hal ini akan sulit dilakukan mengingat pengurus masjid yang bekerja tanpa di gaji dengan besarnya tuntutan yang diminta dalam melaksanakan praktek tata kelola masjid yang baik.

Lima pokok *Maqashid syari'ah* dalam penelitian ini akan diproksikan dengan pengendalian internal, akuntabilitas dan transparansi. Pengendalian internal merupakan cara bagi entitas atau organisasi untuk menjaga asetnya, hal ini jelas sesuai dengan pokok kelima dari maqashid syariah yaitu *Hifdz Al-Maal* atau memelihara harta. Untuk itulah pengendalian internal menjadi salah satu proksi dari maqashid syariah. Proksi selanjutnya adalah akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas dan transparansi bisa diartikan dengan tanggung jawab dan kejujuran, hal ini jelas sesuai dengan pokok tujuan maqashid syariah yang kedua yaitu *Hifdz An-Nafs* atau memelihara jiwa (Jamaa, 2013). Pokok tujuan maqashid yang pertama yaitu *Hifdz Ad-Din* atau memelihara agama juga dapat dikaitkan dengan akuntabilitas dan transparansi. Dalam Al Qur'an banyak disebutkan perintah untuk bertanggung jawab dan berbuat jujur. Jadi dapat dikatakan dengan menegakkan tanggung jawab dan kejujuran adalah salah satu cara memelihara agama berkaitan dengan diri sendiri.

Makna akuntabilitas pada umumnya adalah berkaitan dengan hubungan dimana orang menjelaskan dan bertanggung jawab mengenai tindakan atau perilaku mereka (Roberts dan Scapens, 1985; Sofia, 2017), hal ini lebih sering dikaitkan dengan tuntutan stakeholder terhadap sumber daya yang dikeluarkan. Akuntabilitas penting untuk menarik dana donasi, hibah dan sumbangan terlebih dalam organisasi non profit. Peran pengungkapan dan pertanggungjawaban akan jauh lebih besar tuntutannya terhadap organisasi non profit dalam pengelolaan dan dalam pencapaian tujuan organisasi mengenai penggunaan dana donasi, hibah dan sumbangan tersebut. Akuntabilitas tradisional sering dianggap oleh organisasi nirlaba sebagai hal formal yang tidak perlu dan birokrasi yang berlebihan, padahal hal tersebut sangat penting baik secara organisasi maupun manajemen (Berardi dan Rea, 2010; Sanusi, 2015).

Akuntabilitas menjadi semakin penting dan sekarang banyak diminta oleh organisasi keagamaan sehubungan dengan skandal dan tuntutan hukum yang telah



terjadi (Salwani, 2014). Siino (2004) memberikan contoh tentang penyalahgunaan dana yang timbul dari kurangnya mekanisme pengendalian internal dan akuntabilitas, termasuk apa yang terjadi di Keuskupan Agung San Francisco, yang mengajukan tuntutan hukum kepada seorang imam yang telah digulingkan karena penggelapan lebih dari \$ 250.000 untuk membiayai liburannya. Dalam kasus lain, seorang pastur Pittsburgh mengaku mencuri \$ 1,35 juta untuk sumbangan selama lebih dari 26 tahun dari dua gereja yang dia layani. Dalam sebuah survei terhadap 548 gereja Baptis Selatan, Siino (2004) menemukan bahwa Gereja tidak memiliki kontrol dasar terhadap salah urus dan penyalahgunaan dana Gereja. Lebih lanjut, 70% dari gereja yang disurvei tidak memiliki prosedur keuangan tertulis. 20% gereja tidak menggunakan dokumentasi tertulis sama sekali sebelum dana dicairkan. Ini hanya beberapa contoh kasus pelanggaran keuangan yang ada di organisasi keagamaan. Palmer (2002) dan Salwani (2014) menemukan bahwa kepercayaan dalam sektor amal sangat rendah.

Sulaiman dkk. (2008) menemukan bahwa penggelapan dana dari organisasi keagamaan (masjid) lebih sering terjadi karena kurangnya pertanggungjawaban dan kurangnya kemampuan dalam akuntansi. Mereka mungkin menyalahgunakan kekuasaan terhadap dana yang terkumpul. Hal tersebut dapat terjadi karena laporan keuangan dan pengendalian Internal tidak akurat, yang seharusnya dapat membantu efektivitas praktik pengelolaan keuangan dan mengurangi beban administrasi (Mohamed, 2014).

Kritik terhadap praktik pengelolaan keuangan banyak disebabkan oleh faktor-faktor buruknya pengendalian internal (Sulaiman et al, 2008; Chenhall, 2010; Henri dan Journeault, 2010; Wahab, 2008; Amudo dan Inanga, 2009; Sanusi, 2015). Hal ini memunculkan banyak kasus seperti penggelapan dana dan skandal tentang pengendalian internal organisasi keagamaan (Sulaiman et al, 2008). Kasus-kasus yang berkaitan dengan salah urus dana yang dihasilkan oleh institusi tersebut ada juga yang berhubungan dengan masjid.

Afifuddin dan Siti-Nabiha (2012) menyatakan organisasi keagamaan tidak memiliki mekanisme pengendalian internal untuk melindungi sumber daya mereka dan menginformasikan agar anggota mereka mengetahui status keuangan

organisasi dan kegiatan penggalangan dana. Sistem pengendalian internal yang baik memastikan bahwa manajer organisasi akan memanfaatkan sumber keuangan dengan cara yang akan melindungi kepentingan penyumbang (Sulaiman et al, 2008). Struktur pengendalian internal yang baik mencakup kebijakan dan prosedur pengendalian dalam hal penarikan dana, bank dan uang tunai, pembelian, pembayaran dan pengawasan, evaluasi dan pelaporan. Dengan demikian, untuk memiliki organisasi yang sukses, dibutuhkan catatan akuntansi yang tepat dan sistem pengendalian manajemen yang tepat (Sanusi, 2015).

Beberapa faktor yang berhubungan dengan pengendalian internal di masjid adalah kurangnya akuntabilitas untuk mengelola sistem akuntansi, kurang partisipasi dalam kegiatan di masjid, tidak tepat dalam pencatatan dan pelaporan pendapatan dan cara yang efektif untuk memperoleh sumber pendapatan di masjid (Alim and Abdullah, 2010; Sanusi, 2015). Selain itu, pengendalian internal yang lemah akan meningkatkan risiko dan dapat mempengaruhi sistem pengendalian manajemen internal dan eksternal yang akan mempengaruhi praktik pengelolaan keuangan di masjid (Mohamed, 2014; Salwani, 2014).

Said (2013) dan Salwani (2014) menyatakan bahwa takmir masjid perlu menciptakan strategi pengendalian internal yang efektif untuk memperbaiki kinerja keuangan. Pengendalian internal yang baik dapat meningkatkan transparansi masjid sehingga meningkatkan kepercayaan para penyumbang untuk menyumbangkan lebih banyak dana ke masjid. Jokipii (2010) membuktikan bahwa tidak adanya pengendalian internal yang baik dapat meningkatkan jumlah kegagalan usaha.

Pengendalian internal yang tepat akan memberikan hasil kinerja keuangan yang lebih baik dan menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal akan memperbaiki program yang dilakukan oleh masjid (Said et al., 2013). Pengendalian internal yang baik seperti pencairan dana, pencatatan dan pelaporan penerimaan pendapatan akan mempengaruhi praktik pengelolaan keuangan di masjid dan meningkatkan kepercayaan para donor untuk menyalurkan uang mereka ke masjid (Salwani, 2014).

Menurut Sulaiman et al (2008) dan Sanusi (2015) untuk menerapkan pengendalian internal yang tepat, komite manajemen atau dalam hal ini pengurus



masjid harus bertanggung jawab dalam memberikan jaminan bahwa pengelolaan dana jamaah digunakan dan dipertanggungjawabkan dengan benar. Wahab (2008) dalam studinya mengemukakan bahwa untuk memperbaiki pengelolaan keuangan di masjid agar lembaga masjid dapat berjalan dengan baik, harus ada berbagai sumbangan, tidak hanya dalam bentuk uang, tapi juga dalam bentuk energi fisik atau ide yang baik. Pengendalian internal penting bagi praktik pengelolaan keuangan di masjid untuk memastikan praktik pengelolaan keuangan yang efisien dan tepat, untuk memastikan agar operasi berjalan lancar sesuai aturan dan peraturan, untuk mengetahui kemampuan pengelolaan masjid dalam mengukur dan mengelola kegiatan secara efektif dan memberikan informasi dalam membuat keputusan yang lebih baik. Oleh karena itu, untuk memiliki pengelolaan masjid yang lebih baik, sosok penting seperti ketua dan bendahara masjid perlu berperan dalam memastikan efektivitas dan efisiensi praktik pengelolaan keuangan di masjid (Sanusi, 2015).

Meskipun pertanggungjawaban semacam itu mungkin tidak dapat dilakukan secara langsung, akuntabilitas sejati dalam Islam melibatkan transparansi dalam pencatatan dan pelaporan karena merupakan bagian dari tindakan pemenuhan hak dan kewajiban oleh pemberi amanat dan memastikan tidak adanya keraguan dan ketidakpastian (Askary dan Clarke, 1997; Sofia, 2017).

Belakangan ini penelitian ini yang berkaitan dengan praktek akuntansi di Lembaga Masjid memang sedang berkembang dan banyak dilakukan. Namun penelitian yang menyangkut pengendalian internal masjid secara luas masih jarang dilakukan. Beberapa penelitian berusaha mencoba untuk mengembangkan aplikasi akuntansi untuk masjid (Rakhmawati, 2015) hal ini bisa digunakan sebagai solusi untuk mengatasi kurangnya kemampuan akuntansi yang dimiliki oleh pengelola masjid. Hal tersebut dapat memperbaiki pengendalian internal masjid yang lebih baik.

Transparansi dalam pengelolaan dana apalagi organisasi non profit seperti masjid jelas merupakan faktor penting dalam pengendalian internal. Banyak peneliti menyoroti bahwa tujuan syariah menuntut kewajiban pada organisasi untuk mencatat dengan jujur dan memberikan keterbukaan atau transparansi yang tidak

disalahartikan dan bias, terutama bila mempengaruhi pengambilan keputusan terutama dalam bidang keagamaan (Gambling dan Karim, 1991; Haniffa dan Hudaib, 2011; Sofia, 2017).

Penelitian mengenai pengungkapan dan pertanggungjawaban organisasi non profit masih sangat minim dibandingkan dengan penelitian yang serupa dalam organisasi pencari keuntungan atau perusahaan. Penelitian semacam ini sebagian besar berpendapat bahwa laporan keuangan tradisional memberikan peran terbatas dalam melaksanakan pertanggungjawaban karena mereka tidak memberikan informasi mengenai aspek-aspek seperti kesuksesan, kinerja dan pengaruh yang jelas (Torres dan Pina, 2003; Sofia, 2017).

Bagi umat Islam, konsep akuntabilitas tidak hanya terbatas pada aspek pribadi dan spiritual namun meluas ke semua urusan yang dilakukan di dunia ini, yaitu semua urusan sosial, bisnis dan kontrak. Hal ini disebabkan prinsip-prinsip yang mendasari Islam, khususnya, konsep tauhid (ke-Esaan Allah), amanah (kepercayaan) dan kepemimpinan (Sofia, 2017).

Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah semakin berkurangnya kepercayaan dan partisipasi jamaah atau masyarakat terhadap organisasi dalam bidang keagamaan (Palmer, 2002; Corderi, 2013; dan Salwani, 2014). Dengan semakin rendahnya tingkat kepercayaan dan partisipasi jamaah dalam organisasi amal dan keagamaan, hal ini jelas dapat mempengaruhi penilaian orang terhadap agama tersebut. Berkurangnya kepercayaan dan partisipasi jamaah juga secara tidak langsung akan dapat menurunkan dana sumbangan, infak dan sedekah dari jamaah kepada organisasi keagamaan seperti masjid. Masjid yang tergolong organisasi nirlaba, mengelola dana publik dan menangani dana yang diterima dan dikeluarkan oleh organisasi, yang dana tersebut diterima dari sumbangan pemerintah, perusahaan dan masyarakat, saat ini telah menjadi area yang menarik untuk diteliti (Salwani, 2014). Jika semua hal urusan dalam dunia secara islam harus dapat dipertanggung jawabkan maka tentu saja pengelolaan keuangan dalam organisasi non profit seperti masjid merupakan hal yang sangat penting mengingat dana yang terkumpul merupakan dana umat. Disinilah peneliti berusaha untuk mengetahui peran pengendalian internal, akuntabilitas dan

transparansi dalam mempengaruhi kepercayaan dan partisipasi jamaah untuk menyumbangkan atau menghibahkan hartanya kepada masjid agar dikelola demi kepentingan umat. Jika pengendalian internal, akuntabilitas dan transparansi masjid dapat mempengaruhi kepercayaan dan partisipasi jamaah, maka akan dapat dipastikan peningkatan terhadap terhadap pengendalian internal, akuntabilitas dan transparansi masjid juga akan meningkatkan donasi, sumbangan, dan hibah yang diterima oleh masjid karena dengan meningkatnya kepercayaan akan serta merta meningkatkan partisipasi jamaah yang secara langsung akan meningkatkan jumlah jamaah sehingga dapat meningkatkan sumbangan yang akan diterima oleh masjid.

Penelitian ini berusaha untuk menganalisa lima pokok Maqashid syariah dengan menggunakan pengendalian internal, akuntabilitas dan transparansi sebagai variabel yang dianalisis terhadap pengaruhnya pada variabel kepercayaan dan partisipasi jamaah. Penelitian ini dilakukan di masjid-masjid yang ada di Kabupaten Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi. Alasan yang mendasari adalah pengaruh Kerajaan Lumajang sebagai kerajaan islam tertua (Nahdloh, 2016) dimungkinkan tersebar sampai pada Kabupaten-Kabupaten disekitarnya dan menjadi objek yang cocok untuk diteliti. Sebagai kerajaan islam yang paling tua jelas penerapan nilai-nilai islam sudah diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari termasuk juga masjid yang ada di kabupaten-kabupaten tersebut sudah menerapkan nilai-nilai lebih dahulu dibandingkan masjid yang lain. Hal tersebut dapat mempengaruhi bagaimana pola pengelolaan masjid di kabupaten-kabupaten tersebut. Untuk itulah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Maqashid Syari’ah Terhadap Kepercayaan dan Partisipasi Jamaah Masjid” di Kabupaten-Kabupaten tersebut.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diungkapkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kepercayaan jamaah masjid?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kepercayaan jamaah masjid?

3. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kepercayaan jamaah masjid?
4. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap partisipasi jamaah masjid?
5. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap partisipasi jamaah masjid?
6. Apakah transparansi berpengaruh terhadap partisipasi jamaah masjid?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk

1. Untuk menganalisis pengaruh pengendalian internal masjid terhadap kepercayaan jamaah masjid.
2. Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap kepercayaan jamaah masjid.
3. Untuk menganalisis pengaruh transparansi terhadap kepercayaan jamaah masjid.
4. Untuk menganalisis pengaruh pengendalian internal terhadap partisipasi jamaah masjid.
5. Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap partisipasi jamaah masjid.
6. Untuk menganalisis pengaruh transparansi terhadap partisipasi jamaah masjid.

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1.4.1 Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini akan memberikan manfaat secara teoritis yaitu:

1. Memberi manfaat terhadap pengembangan *syariah enterprise theory* dan teori pemangku kepentingan dalam menjelaskan permasalahan yang berhubungan dengan pengendalian internal, akuntabilitas, transparansi dan hubungannya dengan kepercayaan dan partisipasi jamaah sehingga kinerja masjid dapat ditingkatkan;

2. Memberi manfaat terhadap pengembangan *theory or reasoned action* dan teori ilmu sosial profertik dalam menjelaskan permasalahan yang berhubungan dengan pengendalian internal, akuntabilitas, transparansi dan hubungannya dengan kepercayaan dan partisipasi jamaah sehingga kinerja masjid dapat dicapai sesuai dengan kaidah syariah;
3. Pengujian terhadap teori dan penelitian tersebut juga bermanfaat untuk mengetahui apakah teori dan penelitian terhadap kualitas pengendalian internal, akuntabilitas, transparansi dan kepercayaan jamaah tersebut sesuai bila di terapkan pada masjid di Indonesia.

#### 1.4.2 Manfaat praktis

Hasil penelitian akan memberikan manfaat secara praktis yaitu:

1. Memberi manfaat atau informasi bagi takmir atau pengurus masjid dalam menentukan variabel-variabel yang mempengaruhi kepercayaan dan partisipasi jamaah masjid.
2. Memberi manfaat bagi jamaah yang peduli terhadap masalah pengendalian internal, akuntabilitas dan transparansi masjid hasil penelitian ini mungkin bisa memberikan informasi tambahan dan juga membuat jamaah untuk lebih sering berpartisipasi dalam kegiatan masjid.
3. Memberi manfaat referensi dan motivasi bagi penelitian berikutnya dalam rangka melakukan penelitian dengan topik yang sama atau yang masih berkaitan.



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 *Syariah Enterprise Theory (SET)*

*Enterprise Theory (ET)* yang telah dikombinasikan dengan nilai-nilai Islam dapat menjadi sebuah teori baru yaitu *Syariah Enterprise Theory (SET)*. Konsep SET lahir sebagai upaya untuk membangun akuntansi syariah, dengan cara memasukkan nilai-nilai tauhid ke dalam konsep *Enterprise Theory*, sehingga menghasilkan konsep yang lebih humanis, transendental dan teleologikal (Wulandari, 2010). Berbeda dengan *entity theory* yang memusatkan perhatian hanya pada kelompok pemilik sehingga hampir seluruh kegiatan perusahaan lebih condong pada pemenuhan kesejahteraan pemilik Konsep *enterprise theory* mengakui adanya pertanggungjawaban kepada kelompok *stakeholders* yang lebih luas tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja (Novarela, 2015).

Triyuwono (2007) menyebutkan bahwa *Syariah Enterprise Theory (SET)* tidak hanya peduli pada kepentingan pemegang saham, tetapi juga pihak-pihak lainnya yang bahkan lebih luas dari *enterprise theory*. *Stakeholders* yang lebih luas dalam SET meliputi Allah SWT, manusia, dan alam. Allah SWT sebagai pencipta dan pemilik sekaligus penguasa tunggal alam semesta beserta sumber daya yang ada (Q.S Al-ahqaaf: 3 dan Al-Baqarah: 284) merupakan *stakeholder* tertinggi dan harus menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. Konsekuensi menetapkan Allah SWT sebagai *stakeholder* tertinggi adalah digunakannya sunnatullah sebagai basis bagi konstruksi akuntansi syariah. Dengan menempatkan Allah sebagai *stakeholder* tertinggi, maka tali penghubung agar akuntansi syariah tetap bertujuan pada “membangkitkan kesadaran ketuhanan” para penggunanya tetap terjamin. Intinya adalah bahwa tata-aturan atau hukum-hukum Allah menjadi pondasi akuntansi syariah.

*Stakeholder* kedua dari SET adalah manusia, yang dapat dibedakan menjadi dua yaitu *stakeholder* langsung dan *stakeholder* tidak langsung. Pihak-pihak yang memberikan kontribusi kepada perusahaan secara langsung entah itu dalam bentuk kontribusi atau investasi keuangan maupun non keuangan disebut

*stakeholder* langsung. Karena kontribusi yang telah mereka berikan kepada perusahaan, maka mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Sementara itu, yang dimaksud dengan *stakeholder* tidak langsung adalah pihak-pihak yang tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan secara langsung, tetapi mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan karena keberadaannya secara tidak langsung mungkin memberikan pengaruh bagi perusahaan.

*Stakeholder* yang ketiga dan terakhir dari SET adalah alam. Alam adalah pihak yang memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung bagi tumbuh dan berkembangnya perusahaan sebagaimana pihak Allah dan manusia. Perusahaan dapat berdiri secara fisik karena didirikan di atas bumi, memproduksi dengan menggunakan bahan baku dari alam, menggunakan energi yang tersebar di alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan menggunakan energi yang tersedia di alam, dan lain-lainnya. Namun, tentu saja alam tidak membutuhkan distribusi kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk uang sebagaimana yang diinginkan manusia. Wujud distribusi kesejahteraan terhadap alam dapat berupa kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam, penghijauan, pencegahan pencemaran, dan lain-lainnya (Wulandari, 2010).

Manusia dituntut untuk mengelola bumi dan sumber daya yang melekat di dalamnya dengan sebaik-baiknya. Selain itu juga, manusia berkewajiban untuk menyebarkan rahmat atau kekayaan kepada seluruh makhluk tidak terbatas kepada manusia saja tetapi juga alam secara keseluruhan dengan cara-cara yang baik, benar, adil dan sesuai dengan akal dan hati nurani yang dimiliki dan sesuai dengan hukum-hukum Allah (Q.S. Al-Anbiyaa ayat 107).

## **2.2 Teori Pemangku Kepentingan**

Teori pemangku kepentingan digunakan untuk menentukan tujuan organisasi, dengan salah satu tujuan utamanya adalah untuk menyeimbangkan tuntutan dari berbagai pemangku kepentingan perusahaan. Chan (2014) berpendapat bahwa organisasi harus bergantung pada pemangku kepentingan eksternal untuk memberikan dukungan sumber daya yang pada gilirannya,



pemangku kepentingan ini mungkin menuntut tindakan tertentu dari organisasi. Ullmann (1985) membahas peran penting yang dimainkan oleh para manajer dalam menilai pentingnya menyeimbangkan dan memenuhi tuntutan konstruktif dari berbagai kelompok pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan perusahaan. Clarkson (1995) mencatat bahwa tanpa dukungan terus menerus dari pemangku kepentingan utama, sebuah organisasi akan mengalami kesulitan dalam mempertahankan kelangsungan usaha. Secara umum, telah dikemukakan bahwa kelangsungan hidup dan keberhasilan jangka panjang sebuah organisasi memerlukan dukungan dari semua pemangku kepentingannya (van der Laan Smith et al, 2005). Oleh karena itu, ketergantungan organisasi terhadap pemangku kepentingan eksternal untuk sumber daya inilah yang memberi pemangku kepentingan tersebut kekuasaan atas organisasi dan perilaku organisasi (Chan, 2014).

Freeman (1999) berpendapat bahwa manajemen pemangku kepentingan strategis menyarankan agar organisasi yang efektif memperhatikan semua hubungan pemangku kepentingan yang dapat mempengaruhi, atau dapat dipengaruhi oleh, pencapaian tujuan perusahaan. Pengelolaan pemangku kepentingan pada dasarnya bersifat pragmatis dalam konsep dan aplikasinya. Oleh karena itu, perusahaan yang efektif akan mengelola semua hubungan pemangku kepentingan yang penting baginya. Ini menunjukkan bahwa tuntutan pemangku kepentingan akan dibahas jika sumber daya yang mereka kontrol sangat penting untuk kelangsungan operasi dan kesuksesan perusahaan. Rencana strategis untuk mengelola hubungan pemangku kepentingan mungkin melibatkan pengembangan reputasi perusahaan dalam tanggung jawab sosial melalui melakukan dan mengungkapkan kegiatan sosial; terutama jika ada hubungan positif antara kinerja lingkungan yang kuat dan kekayaan pemegang saham. Jika kegiatan sosial dipandang sebagai bagian dari rencana manajemen strategis perusahaan untuk memenuhi permintaan *stakeholder*, masuk akal untuk mengharapkan hubungan positif antara kekuatan pemangku kepentingan dan kinerja atau pengungkapan sosial (Roberts, 1992). Oleh karena itu, teori pemangku kepentingan juga

menyediakan kerangka teori yang potensial untuk memeriksa hubungan antara berbagai karakteristik perusahaan dan pengungkapan sosial (Chan, 2014).

### **2.3 Theory of Reasoned Action (TRA)**

Menurut (Lee dan Kotler, 2011), *theory of reason action* yang dikembangkan oleh Ajzen dan Fishbein, menyatakan bahwa prediksi terbaik mengenai perilaku seseorang adalah berdasarkan minat orang tersebut. Minat perilaku didasari oleh 2 faktor utama, yaitu : kepercayaan individu atas hasil dari perilaku yang dilakukan dan persepsi individu atas pandangan orang-orang terdekat individu terhadap perilaku yang dilakukan.

*Theory of Reasoned Action* (TRA) menghubungkan antara keyakinan (*belief*), sikap (*attitude*), kehendak (*intention*) dan perilaku (*behavior*). Kehendak merupakan prediktor terbaik perilaku, artinya jika ingin mengetahui apa yang akan dilakukan seseorang, cara terbaik adalah mengetahui kehendak orang tersebut. Namun, seseorang dapat membuat pertimbangan berdasarkan alasan-alasan yang sama sekali berbeda. Konsep penting dalam teori ini adalah fokus perhatian, yaitu mempertimbangkan sesuatu yang dianggap penting. Kehendak ditentukan oleh sikap dan norma subyektif (Lee dan Kotler, 2011). Dari pengertian diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa praktik atau perilaku menurut *Theory of Reasoned Action* akan dipengaruhi oleh niat individu, dan niat individu tersebut terbentuk dari sikap dan norma subyektif. Salah satu variabel yang mempengaruhi, yaitu sikap, dipengaruhi oleh hasil tindakan yang sudah dilakukan pada masa yang lalu. Sedangkan norma subyektif, akan dipengaruhi oleh keyakinan akan pendapat orang lain serta motivasi untuk menaati keyakinan atau pendapat orang lain tersebut. Sederhananya, orang akan melakukan suatu tindakan, apabila memiliki nilai positif dari pengalaman yang sudah ada dan tindakan tersebut didukung oleh lingkungan individu tersebut (Ajzen, 2012).

### **2.4 Teori Ilmu Sosial Profetik**

Menurut perintah agama, masyarakat muslim seharusnya mempraktekkan akuntansi berdasarkan pada perintah Allah dalam QS. Al-Baqarah (2) : 282.

Perintah ini sesungguhnya bersifat umum dalam arti bahwa praktik pencatatan harus dilakukan dengan benar atas transaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lainnya. Inti dari perintah ini adalah praktek pencatatan yang harus dilakukan dengan benar, adil dan jujur. Hal ini berlaku umum sepanjang masa, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

Kuntowidjojo (1991) menyebutkan perintah normatif Al Quran dioperasionalkan dalam bentuk praktik. Sehingga perintah alquran dapat membumi (dapat dipraktikkan) dalam masyarakat. Selama ini masyarakat muslim secara umum terperangkap pada aspek normative dalam memahami perintah-perintah agama, dan sebaliknya melupakan praktiknya. Sebagai contoh misalnya umat muslim sering mendengarkan ceramah bahwa “bersih itu adalah sebagian dari iman”, tetapi ternyata dalam praktiknya umat muslim tidak dapat mengerjakannya. Hal ini dibuktikan dengan keadaan masjid yang selalu kotor, rumah sakit Islam yang juga kotor, dan masih banyak contoh lainnya.

Di sini terlihat adanya perbedaan yang mencolok antara perintah dengan praktiknya. Dalam kaitannya dengan ini Kuntowidjojo (1991) mengusulkan perlunya “ilmu sosial profetik”. Yang dimaksud dengan ilmu sosial profetik di sini adalah ilmu yang diturunkan dari Al Quran dan hadist nabi dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah yang nantinya digunakan untuk menjembatani antara perintah normatif dengan praktik. Dengan ilmu ini, perintah-perintah normatif menjadi lebih operasional dan dapat dipraktikkan dalam dunia nyata (Kuntowidjojo, 1991).

Dalam konteks ini, akuntansi syariah yang sedang kita bicarakan sebetulnya merupakan bagian dari upaya kita dalam membangun ilmu sosial profetik di bidang akuntansi. Perintah normatif telah ada dalam Al Quran, berikutnya adalah menerjemahkan Al Quran dalam bentuk teori akuntansi syariah yang pada gilirannya digunakan untuk memberikan arah tentang praktik akuntansi yang sesuai dengan syariah (Kuntowidjojo, 1991).

## **2.5 Maqashid Syariah**

Tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk

kehidupan dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Abu Ishaq al-Shatibi dalam Munawwir (1984) merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni:

1. *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama)
2. *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa)
3. *Hifdz Al'Aql* (Memelihara Akal)
4. *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan)
5. *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta)

Kelima tujuan hukum Islam tersebut di dalam kepustakaan disebut *al-maqasid al khamsah* atau *al-maqasid al- shariah*. Menurut Satria Effendi M. Zein dalam Jamaa (2013), *maqasid syariah* adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia. Konsep *maqasid syariah* pada hakekatnya didasarkan pada wahyu untuk mewujudkan kemaslahatan hidup umat manusia. Semua perintah dan larangan syariat bermuara kepada pemeliharaan lima unsur pokok ini.

Menurut Ghulam (2016) tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari dua segi yakni (1) segi Pembuat Hukum Islam yaitu Allah dan Rasul-Nya dan (2) segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu. Jika dilihat dari pembuat hukum Islam tujuan hukum Islam itu adalah: Untuk memelihara keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier, yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah *daruriyyat*, *hajjiyat* dan *tahsniyyat*. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang diperluakn untuk mencapai kehidupan primer, seperti kemerdekaan, persamaan, dan sebagainya, yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan hidup manusia selain yang bersifat primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat, misalnya sandang, pangan, perumahan dan lain-lain.



Tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Agar dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari *Ushul Fiqh* yakni dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya. Adapun pijakan kemaslahatan bersumber dari al-Quran dan hadist yang kemudian dari keduanya manusia *berijtihad* untuk menentukan kemaslahatan yang diidealisasikan dalam hidup dan kehidupannya (Ghulam, 2016).

Di samping itu dari segi pelaku hukum Islam yakni manusia sendiri, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Caranya adalah, dengan mengambil yang bermanfaat, mencegah atau menolak yang buruk bagi kehidupan. Dengan kata lain tujuan hakiki hukum Islam, jika dirumuskan secara umum, adalah tercapainya keridaan Allah dalam kehidupan manusia di bumi ini dan di akhirat kelak.

Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan didalam agama islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syariat yang merupakan sikap hidup seorang muslim baik dalam berrhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Karena itulah maka hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinannya.

Beragama merupakan kekhususan bagi manusia, merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia. Allah memerintahkan kita untuk tetap berusaha menegakkan agama, firmanNya dalam surat *Asy-Syura*: 13: Dia Telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang Telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang Telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang Telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka

kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).

Untuk tujuan ini, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman *Qishas* (pembalasan yang seimbang), sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir panjang karena apabila orang yang dibunuh itu mati, maka si pembunuh juga akan mati atau jika orang yang dibunuh itu tidak mati tetap hanya cedera, maka si pelakunya juga akan cedera. Mengenai hal ini dapat kita jumpai dalam firman Allah Swt dalam QS Al-Baqarah ayat 178-179 yang berbunyi: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishaash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (*diat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam *qishaash* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Manusia adalah makhluk Allah ta'ala, ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Pertama, Allah SWT telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik, dibandingkan dengan bentuk makhluk-makhluk lain dari berbagai makhluk lain. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah ta'ala sendiri dalam Al-Quran At-Tiin Ayat 4 berbunyi: Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Akan tetapi bentuk yang indah itu tidak ada gunanya, kalau tidak ada hal yang kedua, yaitu akal. Oleh karena itu Allah ta'ala melanjutkan Firman-Nya dalam surat At-Tiin ayat 5 dan 6 yang berbunyi: Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka), Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.

Jadi, akal paling penting dalam pandangan Islam. Oleh karena itu Allah ta'ala selalu memuji orang yang berakal. Hal ini dapat dilihat pada firman Allah

ta'ala dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 164 yang berbunyi: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.

Perlindungan islam terhadap keturunan adalah dengan menyuruh kepada pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan pencampuran antara dua manusia yang belainan jenis itu tidak dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Malahan tidak melarang itu saja, tetapi juga melarang hal-hal yang dapat membawa kepada zina. Sebagaimana firman Allah ta'ala: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Q.S An-Nisa: 3-4). Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Islam meyakini bahwa semua harta di dunia ini adalah milik Allah ta'ala, manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya saja. Meskipun demikian Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia itu manusia sangat tamak kepada harta benda, sehingga mau mengusahakannya dengan jalan apapun, maka islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk ini Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai menggadai, dan sebagainya, serta melarang penipuan, riba dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain



untuk membayarnya, harta yang dirusak oleh anak-anak yang di bawah tanggungannya, bahkan yang dirusak oleh binatang peliharaannya sekalipun. Perlindungan Islam terhadap harta benda seseorang tercermin dalam firmanNya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S. An-Nisa: 29-32).

## 2.6 Pengendalian Internal

*Committee on Auditing Procedures, SAS (Statement on Auditing) No. 1* dalam Andayani (2011) mengatakan bahwa pengendalian internal terdiri dari rencana organisasi yang mengkoordinasikan dan melakukan pengukuran dalam suatu usaha untuk mengamankan aset (harta organisasi/entitas), mengecek keakuratan dan data akuntansi yang dapat dipercaya sehingga dapat meningkatkan operasional secara efisien dan meningkatkan ketaatan terhadap kebijakan manajerial.

SAS 55 dalam Andayani (2011) menyebutkan bahwa suatu susunan pengendalian internal terdiri dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang dibuat untuk memberikan kepastian secara wajar bahwa tujuan perusahaan secara khusus akan dicapai. Duh (2014) dan Hunziker (2017) mengatakan bahwa pengendalian internal terdiri dari :

1. Pengendalian administratif meliputi perencanaan organisasi, prosedur dan pencatatan yang berkaitan dengan proses keputusan berdasarkan otorisasi manajemen atas transaksi.
2. Pengendalian akuntansi terdiri dari perencanaan organisasi, prosedur dan catatan yang berkaitan dengan perlindungan aktiva dan keandalan pencatatan akuntansi yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang wajar.

Moeller (2009) dan Deng (2017) memberikan definisi mengenai pengendalian internal sebagai proses yang dipengaruhi oleh aktivitas dewan komisaris, manajemen atau pegawai lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang wajar mengenai pencapaian tujuan yang meliputi (1) keandalan

pelaporan keuangan; (2) Efektifitas dan efisiensi operasi; (3) Ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Moeller (2009) menyebutkan bahwa terdapat lima komponen pengendalian internal yang disebut dengan model pengendalian COSO (*committee of sponsoring organization*) yaitu sebagai berikut.

#### 1. Lingkungan pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian adalah menggambarkan keseluruhan sikap organisasi yang mempengaruhi kesadaran dan tindakan personal organisasi mengenai pengendalian. Berbagai faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu organisasi adalah nilai integritas dan etika, kompetensi, filosofi dan gaya manajemen, struktur organisasi, pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab, kebijakan, praktek sumber daya manusia, kepentingan terhadap kesejahteraan organisasi.

#### 2. Penentuan risiko (*Risk Assessment*)

Penentuan risiko meliputi penentuan resiko di semua aspek organisasi dan penentuan kekuatan organisasi melalui evaluasi risiko, serta pertimbangan tujuan di semua bidang operasi untuk memastikan bahwa semua bagian organisasi bekerja secara harmonis. Dengan demikian penaksiran risiko merupakan proses identifikasi, analisis dan pengelolaan risiko yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan akuntansi yang diterima umum.

#### 3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat oleh manajemen. Aktivitas pengendalian tersebut meliputi persetujuan, tanggung jawab dan kewenangan, pemisahan tugas, pendokumentasian, rekonsiliasi, karyawan yang kompeten dan jujur dan audit internal. Aktivitas pengendalian internal bisa dibagi menjadi pengendalian pengolahan informasi, pemisahan tugas yang memadai, pengendalian fisik aset perusahaan, dan peninjauan atas kinerja.

#### 4. Informasi dan komunikasi (*Information and Communication*)

Informasi dan komunikasi merupakan bagian penting dari proses manajemen. Komunikasi informasi tentang operasi pengendalian internal

memberikan substansi yang dapat digunakan manajemen untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian dan untuk mengelola operasinya.

#### 5. Pengawasan (*Monitoring*)

Pengawasan merupakan evaluasi rasional yang dinamis atas informasi yang diberikan pada komunikasi informasi untuk tujuan pengendalian manajemen.

### 2.7 Akuntabilitas

Akuntansi dalam arti luas sangat penting bagi Islam, karena pertanggungjawaban kepada Tuhan dan masyarakat atas semua aktivitas sangat penting bagi kepercayaan umat Islam. Akun adalah akar akuntansi, dan referensi dalam Al Quran “akun” dalam pengertian generiknya, yang berkaitan dengan kewajiban seseorang untuk memperhitungkan kepada Allah atas semua hal yang berkaitan dengan usaha manusia dimana setiap Muslim harus bertanggung jawab (Askary dan Clarke, 1997; Mohammed, 2014). Hal ini seharusnya memberikan penilaian tambahan terhadap apa yang telah ada dalam laporan keuangan terutama dalam lembaga masjid. Setiap muslim sendiri harus mempertanggungjawabkan segala tindakan baik dan buruk mereka kepada Allah yang akan diperhitungkan di hari penghakiman. Cerminan atas tindakan ini juga seharusnya dipakai dalam pengelolaan keuangan lembaga keagamaan, Namun meski begitu banyak lembaga keagamaan yang tidak mempunyai sistem pertanggungjawaban yang baik dan kebanyakan hanya berdasarkan prinsip kepercayaan terhadap pengelola (Andarsari, 2016; Simanjuntak, 2011; Mohammed, 2014).

Simanjuntak (2011) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa argumentasi untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana masjid sepertinya tidak begitu kuat. Laporan mengenai siapa saja yang menyumbang dan digunakan untuk apa dana tersebut seringkali datang dari penyumbang sendiri agar jama'ah dan masyarakat tahu siapa yang telah menyumbang dan dana itu digunakan untuk apa. Fakta ini memberikan gambaran bahwa akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan masjid masih sangat kurang apalagi dalam penggunaan akuntansi modern untuk pencatatannya.

Dalam penelitian lain, Mohammed (2014) meneliti tata kelola dan akuntabilitas organisasi non profit di Indonesia, termasuk organisasi non profit Islam. Mereka menemukan berbagai kelemahan dalam organisasi non profit Indonesia. Pertama adalah isu mengenai tata kelola internal yang lemah, yang mencakup proses pengambilan keputusan organisasi, pembagian peran antara dewan dan eksekutif, pembentukan mekanisme akuntabilitas kepada konstituen, serta isu-isu yang berkaitan dengan pengembangan visi, misi dan tujuan organisasi. Isu kedua berkaitan dengan pertanggungjawaban organisasi-organisasi ini, baik untuk pemerintah maupun masyarakat. Sampai saat ini, organisasi non profit masih mengutamakan pertanggungjawaban kepada lembaga donor dalam bentuk narasi dan memberikan laporan keuangan mengenai proyek. Ketiga adalah kurangnya hubungan eksternal dengan organisasi non profit lainnya dan juga masyarakat luas. Keempat berkaitan dengan kurangnya manajemen, termasuk perencanaan keuangan, perencanaan strategis dan pengembangan program serta pengelolaan sumber daya manusia. Dalam penelitiannya, Mohammed (2014) juga berpendapat bahwa mayoritas organisasi non profit tidak memiliki kriteria atau parameter untuk mengukur pencapaian program atau kegiatan.

Kelemahan ini juga diungkapkan Simanjuntak (2011) bahwa keterbatasan sumber daya manusia, merupakan argumentasi rasional untuk mengelak dari akuntabilitas dan transparansi publik. Selain itu, pengelolaan dana masjid masih menggambarkan bahwa praktek akuntabilitas dan transparansi yang dilaksanakan berbasis kepercayaan antar pengurus. Pengelolaan keuangan masjid lebih banyak diketahui oleh ketua dan bendahara, beberapa pengurus merasa bahwa hal ini masih belum mencerminkan akuntabilitas dan transparansi, karena jangankan jama'ah atau masyarakat mengetahui secara rinci pengelolaan keuangan masjid tersebut, beberapa pengurus saja juga tidak mengetahui secara jelas pengelolaan keuangan yang dilakukan masjid.

Temuan lain sebuah penelitian yang dilakukan oleh Rahim, Goddard dan Andrew (2003) dan Mohammed (2014) Dewan Agama Islam di Malaysia menunjukkan bahwa ada peran yang terbatas pada akuntansi dan bahwa akuntan memainkan peran minimal dalam proses pengambilan keputusan keuangan. Lebih



jauh lagi, praktik akuntansi dalam organisasi keagamaan Islam kurang berkembang dan tidak memainkan peran penting dalam kegiatan organisasi. Akuntansi dianggap hanya sekedar teknologi untuk mencatat transaksi keuangan. Selain itu, pembuatan laporan keuangan tahunan eksternal tidak dianggap sebagai proses penting dan juga laporan itu sendiri tidak dianggap sebagai dokumen penting.

Seperti sudah disebutkan sebelumnya pertanggungjawaban dalam Islam mengharuskan setiap muslim untuk memastikan bahwa aktivitas mereka di dunia ini sesuai dengan peraturan Islam. Manusia bertanggung jawab kepada Tuhan dan kesuksesannya di akhirat bergantung pada perilakunya di dunia ini (Mohammed, 2014). Konsep ini merupakan inti dari Islam, yang berlaku untuk ranah politik, sosial dan individu. Islam memandang prinsip pertanggungjawaban sebagai hal yang sangat penting dan berlaku untuk semua hal. Meskipun Islam mempromosikan tata pemerintahan dan akuntabilitas yang baik, praktik sebenarnya banyak yang harus dibenahi.

Salah satu tantangan untuk akuntabilitas yang lebih baik dalam organisasi berbasis agama adalah bahwa sebagian besar pekerjaan mereka berkaitan dengan isu-isu yang berkaitan dengan jiwa, yang tidak mudah diukur (Afifuddin dan Siti-Nabiha, 2010; Mohammed, 2014). Misi dari kegiatan keagamaan tentunya adalah menyebarkan ajaran, memberikan kedamaian hati, membantu mereka yang kesusahan, namun banyak dari hal ini yang tidak bisa diukur sehingga sangat sulit untuk mengukur hasil sebenarnya dari kegiatan keagamaan.

## **2.8 Transparansi**

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparansi di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan

masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak (Mardiasmo, 2009).

Transparansi penyelenggaraan publik merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan ataupun pengendaliannya, serta mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik utamanya meliputi sepuluh elemen yaitu manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik, prosedur pelayanan, persyaratan teknik dan administratif pelayanan, rincian biaya pelayanan, waktu penyelesaian pelayanan, pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab, lokasi pelayanan, janji pelayanan, standar pelayanan publik, dan informasi pelayanan (Komarudin dan Yudo, 2011).

Pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*openness*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Mardiasmo, 2009). Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami (Mardiasmo, 2009). Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fiskal, informasi, dan penjabarannya (Mardiasmo, 2009).

Menurut Sutedjo (2009) transparansi dan akuntabilitas merupakan konsep yang berkaitan erat satu dengan yang lain, karena tanpa transparansi tidak mungkin ada akuntabilitas. Sebaliknya transparansi tidak akan banyak bermanfaat tanpa dilengkapi dengan akuntabilitas. Seperti halnya di bidang kebijakan publik yang lain, keberadaan transparansi dan akuntabilitas merupakan syarat mutlak untuk membangun kebijakan dan institusi yang efektif, efisien, dan adil (*equitable*). Lingkup transparansi dan akuntabilitas harus menjangkau beberapa tingkat kebijakan mulai dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, sampai pada pelaksanaannya yang terjadi di segenap institusi.

Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga



keagamaan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga keagamaan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya (Sutedjo, 2009).

## 2.9 Kepercayaan

Menurut Mayer et al. (1995) faktor yang membentuk kepercayaan seseorang terhadap yang lain ada tiga yaitu kemampuan (*ability*), kebaikan hati (*benevolence*), dan integritas (*integrity*). Ketiga faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

### a. Kemampuan (*Ability*)

Kemampuan mengacu pada kompetensi dan karakteristik takmir masjid dalam melakukan tugas dalam mengelola dana umat yang ada di masjid. Dalam hal ini, bagaimana takmir masjid mampu menyediakan, melayani, sampai mengamankan transaksi dari gangguan pihak lain. Artinya bahwa jamaah memperoleh jaminan kepuasan dan keamanan dari takmir masjid dalam melakukan donasi atau sumbangan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan umat. Kim et al. (2003a) menyatakan bahwa *ability* meliputi kompetensi, pengalaman, pengesahan institusional, dan kemampuan dalam ilmu pengetahuan.

### b. Kebaikan hati (*Benevolence*)

Kebaikan hati merupakan kemauan takmir masjid dalam memberikan kepuasan yang saling menguntungkan antara dirinya dengan jamaah dalam hal ini takmir diberi amanat oleh jamaah untuk mengelola dana masjid. Takmir masjid bukan semata-mata hanya mengelola dana masjid, melainkan juga memiliki perhatian yang besar dalam mewujudkan kepuasan terhadap jamaah atau penyumbang. Menurut Kim et al. (2003a), *benevolence* meliputi perhatian, empati, keyakinan, dan daya terima.

### c. Integritas (*Integrity*)

Integritas berkaitan dengan bagaimana perilaku atau kebiasaan takmir masjid dalam mengelola dana umat dan menjalankan program kegiatan. Informasi

yang diberikan kepada jamaah apakah benar sesuai dengan fakta atau tidak. Dana yang dikelola dan disalurkan untuk kegiatan masjid dan sosial apakah dapat dipercaya atau tidak. Kim et al. (2003a) mengemukakan bahwa *integrity* dapat dilihat dari sudut kewajaran (*fairness*), pemenuhan (*fulfillment*), kesetiaan (*loyalty*), keterus-terangan (*honestly*), keterkaitan (*dependability*), dan kehandalan (*reliabilty*).

## 2.10 Partisipasi

Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam suatu kegiatan tertentu (Kim et al., 2003b). Dalam konteks lembaga keagamaan, partisipasi diukur dengan banyaknya jamaah dalam mengikuti kegiatan yang diadakan masjid. Partisipasi sangat ditentukan oleh kepercayaan terhadap rekanan, media, atau lainnya yang terlibat dalam suatu kegiatan.

Partisipasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh masjid akan tumbuh dengan baik apabila takmir masjid mampu menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh jamaah atau penyumbang. Ketika jamaah merasakan bahwa takmir masjid telah menjaga dengan baik kepercayaan yang diberikan, maka jamaah dengan senang hati akan terus meningkatkan partisipasinya. Bahkan dalam situasi tertentu, jamaah akan mengajak atau memberitahukan kepada rekannya yang lain untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Sesuai dengan *Theory of Reasoned Action* (TRA) oleh Fishbein dan Ajzen (1975), disimpulkan bahwa kepercayaan akan membentuk sikap seseorang, sehingga akan mempengaruhi niat dan perilaku seseorang. Berdasarkan teori tersebut, maka kepercayaan seseorang terhadap takmir masjid akan mempengaruhi intensitasnya dalam berpartisipasi untuk mengikuti kegiatan di masjid tersebut.

## 2.11 Penelitian Terdahulu

Sanusi (2015) dalam penelitiannya membahas pengungkapan naratif oleh Organisasi Amal Muslim (MCOs) di Inggris. Dengan menggunakan analisis isi, peneliti menilai pengungkapan laporan tahunan MCOs terhadap *Statement Recommended Reporting Practices* (SORP) untuk badan amal yang menggunakan

perspektif dari akuntabilitas termasuk konsep akuntabilitas Islam. Temuan menunjukkan bahwa pengungkapan terbatas dalam menunjukkan bagaimana transaksi dan aktivitas memenuhi persyaratan pelaporan yang diwajibkan. MCOs perlu meningkatkan kesadaran akan peraturan dan tantangan dalam sektor ini serta pengawasan terhadap praktek pelaporan naratif terutama dalam membuat pelaporan wajib dan akuntabilitas terhadap agama.

Salwani (2014) melakukan penelitian yang dimaksudkan untuk membahas isu-isu dalam sistem pengelolaan dana masjid terutama mengenai akuntabilitas dan praktek internal pengendalian Masjid yang tergolong organisasi nirlaba dan menangani dana publik yang diterima dari pemerintah, sumbangan perusahaan dan masyarakat, mengendalikan kegiatan keuangan dalam menggunakan dana yang diterima dan dikeluarkan oleh organisasi telah menjadi permasalahan yang menarik untuk diselidiki. Berdasarkan pembahasan tersebut, disarankan agar praktek pengendalian internal oleh Masjid Jameq pada penerimaan pendapatan dan pengeluaran dana memerlukan perhatian yang signifikan.

Sofia (2017) melakukan penelitian yang menguji efektivitas sistem pengendalian internal, pengelolaan keuangan dan praktik akuntabilitas masjid di Malaysia Berdasarkan 500 kuesioner yang diberikan kepada ketua dan bendahara dari 250 masjid terpilih yang ada di Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Penelitian ini menunjukkan bahwa pencatatan transaksi keuangan yang tepat dan akurat, meningkatkan pertanggungjawaban ketua dan bendahara dalam rangka meningkatkan produktivitas dan efektivitas kinerja. Variabel-variabel tersebut memberikan implikasi penting untuk memperluas pemahaman kita tentang praktik pengelolaan keuangan dalam organisasi nirlaba dan menciptakan peluang penelitian baru. Hasilnya menunjukkan penggunaan dana dan sistem pengendalian internal memiliki hubungan yang signifikan dengan praktik pengelolaan keuangan. Hasil yang lain, partisipasi anggaran, dan akuntabilitas tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan praktik pengelolaan keuangan.

Hyndman (2017) melakukan penelitian mengenai pentingnya akuntabilitas sebagai sarana untuk mengembangkan, mempertahankan, dan memulihkan kepercayaan pada badan amal. Melalui serangkaian wawancara dengan manajer

dari badan amal, ia menyelidiki mekanisme publik dan swasta yang digunakan dalam melaksanakan akuntabilitas, dan membangun kepercayaan dengan kelompok pemangku kepentingan. Hasil penelitiannya menemukan pentingnya bagi badan amal untuk mengeluarkan akuntabilitas kepada berbagai pemangku kepentingan sebagai dasar untuk mengamankan dan membangun kepercayaan. Mekanisme akuntabilitas ini sering dilihat sebagai hal yang terpisah dan berbeda, namun pada kenyataannya, dianggap oleh banyak badan amal sebagai sesuatu yang saling berhubungan dan berpotensi memperkuat dan membangun kepercayaan dengan para pemangku kepentingan utama. Tidak adanya mekanisme akuntabilitas publik yang berkualitas baik dapat menghambat efektifitas badan amal dalam membangun kepercayaan sehingga dapat mengancam efektifitas dan kelangsungan hidup dari badan amal.

## **2.12 Pengembangan Hipotesis**

### **2.12.1 Pengendalian Internal Berpengaruh Terhadap Kepercayaan Jamaah**

Teori sosial profetik menurut Kuntowidjojo (1991) adalah ilmu yang diturunkan dari Al Qur'an dan hadist nabi dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah yang nantinya digunakan untuk menghubungkan antara perintah yang ada dengan praktek yang dilakukan. Dengan ilmu ini, perintah-perintah yang ada dalam Al Qur'an dan hadist nabi menjadi lebih jelas dan dapat dipraktekkan dalam dunia nyata.

Pengendalian internal merupakan upaya entitas atau organisasi dalam mengamankan asetnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membuat catatan atau laporan keuangan. Hal ini jelas sejalan dengan perintah Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al Baqarah 282 yang memberikan seruan untuk melakukan pencatatan atas harta dan hendaknya melakukan pencatatan itu dengan benar. Apabila masjid dalam melakukan pengelolaan dana jamaah sudah dilakukan dengan pencatatan yang baik yang sesuai dengan kaidah akuntansi dan islam maka hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan jamaah terhadap pengelolaan dana umat yang dilakukan oleh masjid tersebut.



Penelitian yang dilakukan oleh Sofia (2017) menunjukkan penggunaan dana dan pengendalian internal memiliki hubungan yang signifikan dengan praktik pengelolaan keuangan. Melihat dari hasil tersebut, praktek pengelolaan keuangan masjid yang lebih baik merupakan salah satu faktor yang penting dalam memperbaiki atau meningkatkan sistem pengendalian internal yang baik. Dengan pengendalian internal yang lebih baik dalam pengelolaan kegiatan dan dana masjid hal ini tentunya secara tidak langsung akan dapat meningkatkan kepercayaan jamaah terhadap lembaga masjid. Jamaah akan berpikir sedekah atau infaq yang mereka sumbangkan atau hibahkan ke masjid akan dapat dikelola secara benar karena mengetahui bahwa lembaga masjid yang mempunyai pengendalian internal yang baik. Untuk itulah peneliti merumuskan:

Hipotesis 1 : pengendalian internal berpengaruh terhadap kepercayaan jamaah

#### 2.12.2 Akuntabilitas Berpengaruh Terhadap Kepercayaan Jamaah

Triyuwono (2007) menyebutkan bahwa *Syariah Enterprise Theory* (SET) tidak hanya peduli pada kepentingan pemegang saham, tetapi stakeholders yang lebih luas yaitu meliputi Allah, manusia, dan alam. Allah SWT sebagai pencipta dan pemilik sekaligus penguasa tunggal alam semesta beserta sumber daya yang ada (Q.S Al-ahqaaf: 3 dan Al-Baqarah: 284) merupakan *stakeholder* tertinggi dan harus menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. Konsekuensi menetapkan Allah sebagai stakeholder tertinggi adalah digunakannya *sunnatullah* sebagai basis bagi konstruksi akuntansi syariah. Intinya adalah bahwa tata-aturan atau hukum-hukum Allah menjadi pondasi akuntansi syariah.

Makna akuntabilitas pada umumnya adalah berkaitan dengan hubungan dimana orang menjelaskan dan bertanggung jawab mengenai tindakan atau perilaku mereka (Sofia, 2017). Hal ini jelas sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Al Qur'an. Dengan kata lain apabila masjid mempunyai akuntabilitas yang baik dapat tentunya akan dapat meningkatkan kepercayaan jamaah. Jamaah akan yakin bahwa kegiatan atau pengelolaan dana yang dilakukan lembaga masjid memang benar dan telah sesuai dengan apa yang direncanakan dalam kegiatan masjid bila kegiatan tersebut mempunyai pertanggungjawaban yang jelas.



Akuntabilitas atau pertanggung jawaban merupakan salah satu sifat baik yang harus ada dalam diri manusia bisa juga entitas atau organisasi khususnya organisasi berbasis islam. Akuntabilitas dapat memainkan peran penting dalam mengembangkan, memelihara dan bahkan memperbaiki kepercayaan dengan menunjukkan bahwa harapan pemangku kepentingan atas pertanggung jawaban terpenuhi. Selain itu, dapat mengurangi informasi asimetri yang berpotensi menghambat munculnya rasa kepercayaan (Hyndman, 2017).

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang baik mengenai bagaimana dana umat yang ada di masjid dikelola oleh takmir masjid tentunya akan dapat meningkatkan kepercayaan jamaah. Jamaah akan yakin bahwa kegiatan atau pengelolaan dana yang dilakukan lembaga masjid memang benar dan telah sesuai dengan apa yang direncanakan dalam kegiatan masjid bila kegiatan tersebut mempunyai pertanggungjawaban yang jelas. Dalam penelitiannya Hyndman (2017) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan salah satu faktor dalam meningkatkan kepercayaan dalam organisasi amal. Namun dalam penelitian Sofia (2017) menyebutkan bahwa partisipasi anggaran dan akuntabilitas tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan. Untuk itulah peneliti merumuskan:

Hipotesis 2 : akuntabilitas berpengaruh terhadap kepercayaan jamaah

### 2.12.3 Transparansi Berpengaruh Terhadap Kepercayaan Jamaah

Chan (2014) menyatakan bahwa teori pemangku kepentingan digunakan untuk menentukan tujuan organisasi, dengan salah satu tujuan utamanya adalah untuk menyeimbangkan tuntutan dari berbagai pemangku kepentingan perusahaan dan organisasi harus bergantung pada pemangku kepentingan eksternal untuk memberikan dukungan sumber daya yang pada akhirnya, pemangku kepentingan ini mungkin menuntut tindakan tertentu dari organisasi. Jelas sekali bahwa jamaah merupakan salah pemangku kepentingan yang penting bagi masjid. Said (2014) menyatakan bahwa masyarakat menginginkan perubahan terhadap pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Meskipun tuntutan itu ditujukan terhadap bidang pemerintahan dan opini tersebut adalah dari masyarakat secara umum, namun hal

ini juga bisa dikatakan tuntutan dari jamaah terhadap masjid. Tentunya tuntutan tersebut apabila dipenuhi jelas akan meningkatkan kepercayaan jamaah sebagai pemangku kepentingan terhadap masjid.

Ter Bogt dan Tillema dalam O'Neill (2006) berpendapat bahwa, di organisasi sektor publik, penyediaan informasi akuntansi formal yang dikombinasikan dengan transparansi yang lebih luas dan kontak informal sangat penting dalam membangun kepercayaan. Transparansi berhubungan dengan memberikan kepastian, yang lebih daripada pengungkapan untuk memberikan informasi yang dapat diakses dan dinilai pihak yang relevan. Transparansi dapat dilihat sebagai salah satu syarat utama untuk meningkatkan kepercayaan.

Bicara tentang transparansi, tentunya yang paling mudah diamati apakah transparansi itu sudah dijalankan atau belum, seringkali bisa dilihat dari bagaimana suatu lembaga atau badan publik itu transparan dalam penggunaan dananya. Jika dalam penggunaan dana sudah transparan, maka bisa dijamin lembaga masjid tersebut akan terbuka di sisi yang lain. Keterbukaan ini tentu akan dapat meningkatkan kepercayaan jamaah masjid. Penelitian Hyndman (2017) menyatakan bahwa transparansi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari akuntabilitas merupakan salah satu faktor dalam meningkatkan kepercayaan pada organisasi amal. Untuk itulah peneliti merumuskan:

Hipotesis 3 : transparansi berpengaruh terhadap kepercayaan jamaah

#### 2.12.4 Pengendalian Internal Berpengaruh Terhadap Partisipasi Jamaah

*Syariah Enterprise Theory* (SET) lahir sebagai upaya untuk membangun akuntansi syariah, dengan cara memasukkan nilai-nilai tauhid ke dalam konsep *Enterprise Theory*, sehingga menghasilkan konsep yang lebih humanis, transendental dan teologikal (Wulandari, 2010). Berbeda dengan *entity theory* yang memusatkan perhatian hanya pada kelompok pemilik sehingga hampir seluruh kegiatan entitas lebih condong pada pemenuhan kesejahteraan pemilik Konsep *enterprise theory* mengakui adanya pertanggungjawaban kepada kelompok *stakeholders* yang lebih luas tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja (Novarela, 2015). *Stakeholders* yang lebih luas dalam SET meliputi Allah, manusia, dan alam.

Dengan menempatkan Allah SWT sebagai stakeholder tertinggi, maka harus mengikuti tata-aturan atau hukum-hukum Allah.

Pengendalian internal merupakan upaya entitas atau organisasi dalam mengamankan asetnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membuat catatan atau laporan keuangan. Hal ini jelas sejalan dengan perintah Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al Baqarah 282 yang memberikan seruan untuk melakukan pencatatan atas harta dan hendaknya melakukan pencatatan itu dengan benar. Apabila masjid dalam melakukan pengelolaan dana jamaah sudah dilakukan dengan pencatatan yang baik yang sesuai dengan kaidah akuntansi dan islam maka hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan jamaah terhadap pengelolaan dana umat yang dilakukan oleh masjid tersebut. Bila kepercayaan jamaah sudah meningkat maka besar kemungkinan infaq dan sedekah yang diterima masjid bertambah. Dengan bertambahnya dana masjid, masjid dapat membuat lebih banyak program-program atau kegiatan bagi jamaah sehingga membuat jamaah menjadi tertarik untuk berpartisipasi. Dalam penelitiannya Dow (2012) menyatakan bahwa pengaruh merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan partisipasi. Pengaruh dari kepercayaan jamaah yang meningkat dapat meningkatkan pula partisipasi mereka. Untuk itulah peneliti merumuskan:

Hipotesis 4 : pengendalian internal berpengaruh terhadap partisipasi jamaah

#### 2.12.5 Akuntabilitas Berpengaruh Terhadap Partisipasi Jamaah

Sesuai dengan *Theory of Reasoned Action* (TRA) oleh Fishbein dan Ajzen dalam Lee dan Kotler (2011), dapat disimpulkan bahwa kepercayaan akan membentuk sikap seseorang, sehingga akan mempengaruhi niat dan perilaku seseorang. Berdasarkan teori tersebut, maka kepercayaan seseorang terhadap takmir masjid akan mempengaruhi intensitasnya dalam berpartisipasi untuk mengikuti kegiatan diadakan oleh masjid tersebut. Sedangkan untuk membuat masyarakat atau jamaah masjid percaya terhadap takmir masjid salah satu hal yang harus ditingkatkan adalah akuntabilitas dalam pengelolaan dana masjid.

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang baik mengenai bagaimana dana umat yang ada di masjid dikelola oleh takmir masjid tentunya selain dapat

meningkatkan kepercayaan jamaah juga menarik minat masyarakat atau jamaah untuk peduli dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh lembaga masjid tersebut. Alasan yang mendasari hal tersebut tentunya jamaah akan lebih yakin bahwa kegiatan yang dilakukan lembaga masjid memang benar dan telah sesuai dengan apa yang direncanakan dalam kegiatan masjid bila kegiatan tersebut mempunyai pertanggungjawaban yang jelas. Dalam penelitiannya Weeger (2015) menyatakan bahwa resiko merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi partisipasi dari seseorang. Dengan adanya akuntabilitas dalam pengelolaan dana masjid, hal ini secara otomatis dapat mengurangi resiko ketidakpercayaan jamaah yang membuat jamaah enggan untuk berpartisipasi dalam kegiatan masjid karena dengan adanya pertanggungjawaban yang baik jamaah mendapatkan kepastian mengenai kegiatan yang dilakukan oleh masjid. Untuk itulah peneliti merumuskan:

Hipotesis 5 : akuntabilitas berpengaruh terhadap partisipasi jamaah

#### 2.12.6 Transparansi Berpengaruh Terhadap Partisipasi Jamaah

Menurut Fishbein dan Ajzen dalam Lee dan Kotler (2011), Theory of Reasoned Action (TRA) adalah bahwa kepercayaan akan membentuk sikap seseorang, sehingga akan mempengaruhi niat dan perilaku seseorang. Praktek atau perilaku menurut *Theory of Reasoned Action* akan dipengaruhi oleh niat individu, dan niat individu tersebut terbentuk dari sikap dan tindakan subyektif. Sederhananya, orang akan melakukan suatu tindakan, apabila memiliki penilaian yang baik dari pengalaman atau peristiwa yang sudah ada dan tindakan tersebut didukung oleh lingkungan individu tersebut (Ajzen, (2012).

Berdasarkan teori tersebut, maka penilaian yang baik dari jamaah terhadap takmir masjid yang berusaha untuk transparan dalam pengelolaan dana masjid akan mendorong jamaah untuk ikut berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan diadakan oleh masjid tersebut. Untuk membuat masyarakat atau jamaah masjid percaya terhadap takmir masjid dan memberikan penilaian yang baik salah satu hal yang harus ditingkatkan selain akuntabilitas adalah transparansi yang juga tidak kalah penting dalam pengelolaan dana masjid, karena kedua hal tersebut saling berhubungan.

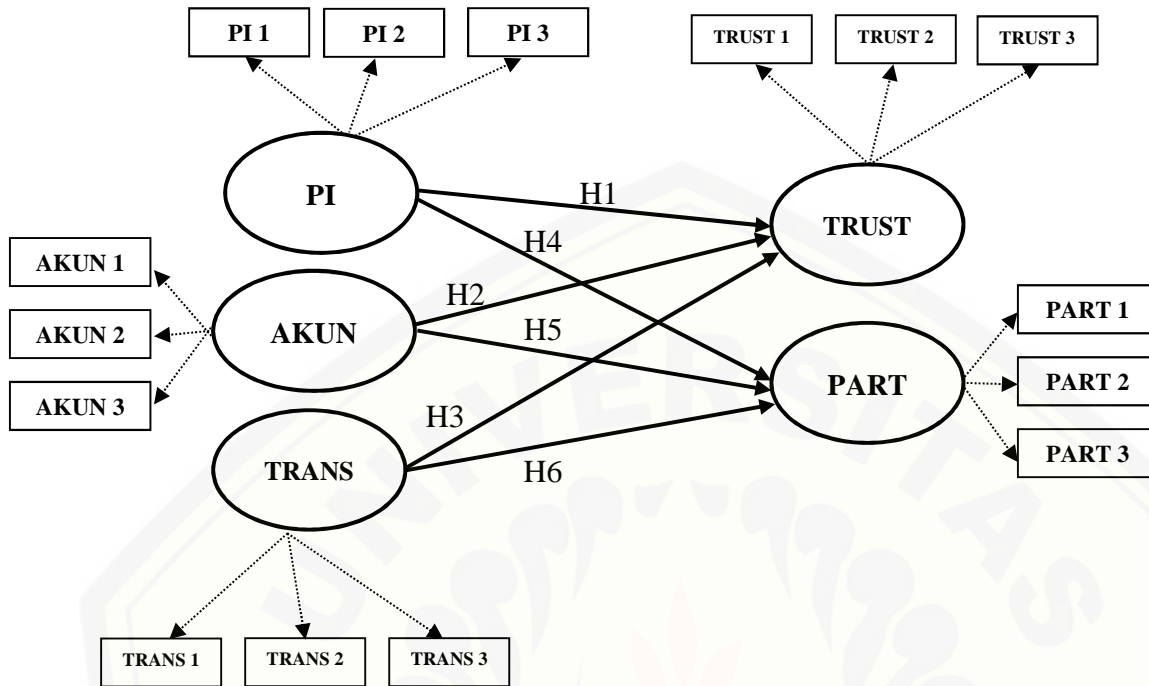
Akuntabilitas dan transparansi jelas sangat erat hubungannya. Bila masjid mempunyai akuntabilitas yang baik maka hampir dapat dipastikan bahwa masjid tersebut juga mempunyai keterbukaan terhadap informasi yang ada didalamnya. Sama halnya dengan akuntabilitas yang baik maka masyarakat akan cenderung tertarik terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh masjid maka masjid yang mempunyai transparansi yang baik juga akan menarik bagi jamaah untuk peduli dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masjid. Dalam penelitiannya Dow (2012) dan Weager (2015) menyatakan bahwa pengaruh dan resiko merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan partisipasi. Pengaruh dari kepercayaan jamaah yang meningkat dapat meningkatkan pula partisipasi mereka. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan dana masjid, hal ini dapat mengurangi resiko ketidakpercayaan jamaah yang membuat jamaah enggan untuk berpartisipasi dalam kegiatan masjid. Untuk itulah peneliti merumuskan:

Hipotesis 6 : transparansi berpengaruh terhadap partisipasi jamaah



### 2.13 Kerangka Konseptual

Kepercayaan dan partisipasi Jamaah mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam lembaga keagamaan seperti masjid. Dana yang dikumpulkan oleh masjid sebagian besar adalah dari sumbangan para jamaah. Tentunya jamaah tersebut dalam menyumbangkan uang mereka kepada masjid sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan mereka terhadap pengelolaan dana dari masjid yang bersangkutan. Partisipasi jamaah juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap sumbangan jamaah kepada masjid. Bila jamaah yang berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh masjid semakin banyak, maka secara otomatis dana yang dikumpulkan oleh masjid juga semakin besar nilainya. Sofia (2017) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pengendalian internal memiliki hubungan yang signifikan terhadap praktik pengelolaan keuangan yang sejatinya juga dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi dari masyarakat atau dalam hal ini jamaah masjid. Dalam penelitian lain menurut Hyndman (2017) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan salah satu faktor dalam meningkatkan kepercayaan dalam organisasi amal. Hal ini tentu menjadi menarik untuk diteliti karena dalam penelitian Sofia (2017) menyebutkan bahwa partisipasi anggaran dan akuntabilitas tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan. Perbedaan dalam kedua penelitian tersebut jelas menjadikan penelitian pada bidang ini menjadi menarik untuk diteliti. Dalam penelitiannya Dow (2012) dan Weager (2015) menyatakan bahwa pengaruh dan resiko merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan partisipasi. Sedangkan pengaruh dan resiko dapat dipengaruhi oleh adanya pengendalian internal, akuntabilitas dan transparansi. Sesuai dengan landasan teori yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui variabel yang menentukan tingkat kepercayaan jamaah dan partisipasi jamaah yang terdiri dari variabel pengendalian internal, akuntabilitas dan transparansi. Berikut ini adalah gambaran dari kerangka konseptual dari penelitian ini.



Gambar 2.1 Diagram jalur lengkap dengan outer model

Keterangan:

- PI = Pengendalian Internal
- AKUN = Akuntabilitas
- TRANS = Transparansi
- TRUST = kepercayaan jamaah
- PART = partisipasi jamaah
- = Variabel Laten
- = Pengaruh
- ⋯→ = Dibentuk

## BAB 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis dan menguji pengaruh variabel pengendalian internal, akuntabilitas dan transparansi serta pengaruhnya terhadap kepercayaan jamaah dan partisipasi jamaah.

Penelitian ini termasuk dalam jenis *explanatory research* yaitu penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan. Hal ini dapat dilihat dari tujuan penelitian yang ingin mendapatkan penjelasan mengenai hubungan-hubungan dari variabel-variabel.

Penelitian ini menggunakan data primer dimana informasi atau data diperoleh berdasarkan berdasarkan pandangan, penilaian, tanggapan atau persepsi dari jamaah masjid di daerah Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur terhadap hubungan antar variabel-variabel yang diteliti.

### 3.2 Populasi, Besar Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *quota sampling*. *Quota sampling* adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan jumlah yang diinginkan oleh peneliti (Acharya, 2013). Metode *quota sampling* digunakan untuk menentukan jumlah sampel yang diambil yaitu 125. Jumlah sampel ditentukan 125, maka pada setiap masjid akan diambil masing-masing 25 sampel.

Populasi dalam penelitian ini adalah jamaah dari seluruh masjid besar (masjid Jami') yang berada di Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dari populasi tersebut akan diambil sampel 25 jamaah dari 5 masjid terbesar (masjid Jami') dari setiap kabupaten yang akan digunakan sebagai sampel. Maka dalam

penelitian ini sebagai unit analisisnya berjumlah 125 jamaah dari 5 masjid besar yang berada di Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Dalam penelitian ini, informasi atau data tentang sistem pengendalian internal, akuntabilitas dan transparansi serta pengaruhnya terhadap kepercayaan jamaah dan partisipasi jamaah diperoleh berdasarkan pandangan, penilaian, tanggapan atau persepsi dari jamaah masjid yang selanjutnya disebut responden penelitian atau sebagai sumber data primer.

### **3.3 Variabel Penelitian**

#### **3.3.1 Klasifikasi Variabel**

Variabel-variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pengendalian internal disingkat PI sebagai variabel eksogen yang independen (X1);
2. Akuntabilitas disingkat AKUN sebagai variabel eksogen yang independen (X2);
3. Transparansi disingkat TRANS sebagai variabel eksogen yang independen (X3);
4. Kepercayaan Jamaah disingkat TRUST sebagai variabel endogen yang pertama (Y1);
5. Partisipasi Jamaah disingkat PART sebagai variabel endogen yang kedua (Y2);

#### **3.3.2 Definisi Operasional Variabel**

Berikut ini akan dijelaskan definisi operasional variabel sistem pengendalian internal, akuntabilitas, transparansi, kepercayaan jamaah, partisipasi jamaah.

##### **1. Pengendalian Internal**

Menurut Hery (2013) pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan

yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan. Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa pengendalian internal adalah suatu kebijakan dan prosedur yang dirancang, serta proses yang integral pada tindakan dan kegiatan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi.

Pengendalian internal akan diukur dengan 3 indikator menurut penelitian Duh (2014) dan Hunziker (2017). Indikator tersebut antara lain: 1. Lingkungan pengendalian; 2. Kegiatan pengendalian; dan 3. Informasi dan komunikasi. Variabel pengendalian internal di dalam penelitian ini diukur dengan instrumen yang menggunakan skala Likert dan hasil pengukurannya adalah berupa data dengan skala interval 1 sampai dengan 5. Ukuran pengendalian internal didasarkan pada hasil rata-rata dari masing-masing item yang diperoleh dari tanggapan responden terhadap item tersebut, dengan cara memilih salah satu dari skala lima poin yang tersedia. Nilai 1 (satu) menunjukkan pengendalian internal sangat buruk, sebaliknya nilai 5 (lima) menunjukkan pengendalian internal sangat baik.

## 2. Akuntabilitas

Menurut PP no 71 tahun 2010 tentang SAP definisi akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa akuntabilitas mempunyai peran yang penting dalam dalam pelaksanaan kegiatan organisasi atau lembaga terutama masjid karena akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat yang harus dilakukan oleh takmir masjid dengan tujuan memberikan pertanggungjawaban pengelolaan dana masjid.

Akuntabilitas akan diukur dengan 3 indikator menurut Mardiasmo (2009) yaitu: 1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran; 2. Akuntabilitas proses; dan 3. Akuntabilitas program dan kegiatan. Variabel akuntabilitas di dalam penelitian ini diukur dengan instrumen yang menggunakan skala Likert dan hasil pengukurannya adalah berupa data dengan skala interval 1 sampai dengan 5. Ukuran akuntabilitas didasarkan pada hasil rata-rata dari masing-masing item yang diperoleh dari



tanggapan responden terhadap item tersebut, dengan cara memilih salah satu dari skala lima poin yang tersedia. Nilai 1 (satu) menunjukkan akuntabilitas sangat buruk, sebaliknya nilai 5 (lima) menunjukkan akuntabilitas sangat baik.

### 3. Transparansi

Transparansi atau keterbukaan berarti bahwa informasi yang berkaitan dengan organisasi tersedia secara mudah dan bebas serta bisa diakses oleh mereka yang terkena dampak kebijakan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Keterbukaan juga bisa berarti informasi yang cukup berkaitan dengan kinerja lembaga tersedia dan disajikan dalam bentuk atau media yang mudah dipahami masyarakat (Watts, 2015).

Transparansi akan diukur dengan 3 indikator menurut Komarudin dan Yudo (2011) yaitu: 1. kesediaan dan aksesibilitas dokumen; 2. kelengkapan informasi yang disampaikan; dan 3. keterbukaan proses. Variabel transparansi di dalam penelitian ini diukur dengan instrumen yang menggunakan skala Likert dan hasil pengukurannya adalah berupa data dengan skala interval 1 sampai dengan 5. Ukuran transparansi didasarkan pada hasil rata-rata dari masing-masing item yang diperoleh dari tanggapan responden terhadap item tersebut, dengan cara memilih salah satu dari skala lima poin yang tersedia. Nilai 1 (satu) menunjukkan Jala'a sangat tertutup, sebaliknya nilai 5 (lima) menunjukkan transparansi sangat terbuka.

### 4. Kepercayaan Jamaah

Mozumder (2016) mendefinisikan trust sebagai kesediaan (*willingness*) seseorang untuk menggantungkan dirinya pada pihak lain dengan risiko tertentu. Sedangkan Ishak (2011) menyatakan menyatakan kepercayaan adalah kesediaan untuk bergantung kepada pihak lain yang telah dipercaya. Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa kepercayaan adalah kesediaan seseorang untuk bergantung atau menggantungkan diri pada pihak lain yang telah dipercaya dengan menghadapi resiko tertentu.

Kepercayaan jamaah akan diukur dengan 3 indikator menurut Mayer (1995) yaitu: 1. Kemampuan; dan 2. Kebaikan hati; dan 3. Integritas. Variabel kepercayaan jamaah di dalam penelitian ini diukur dengan instrumen yang menggunakan skala Likert dan hasil pengukurannya adalah berupa data dengan

skala interval 1 sampai dengan 5. Ukuran kepercayaan jamaah didasarkan pada hasil rata-rata dari masing-masing item yang diperoleh dari tanggapan responden terhadap item tersebut, dengan cara memilih salah satu dari skala lima poin yang tersedia. Nilai 1 (satu) menunjukkan kepercayaan jamaah terhadap takmir sangat tidak percaya, sebaliknya nilai 5 (lima) menunjukkan kepercayaan jamaah terhadap takmir sangat dapat dipercaya.

#### 5. Partisipasi Jamaah

Suroso (2014) menyatakan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan atau keterlibatan secara sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri. Partisipasi adalah proses tumbuhnya kesadaran terhadap hubungan di antara pihak yang berbeda dalam masyarakat, yaitu antara kelompok-kelompok sosial dan komunitas dengan pengambil kebijakan dan lembaga-lembaga lain. Secara sederhana, partisipasi dapat dimaknai sebagai tindakan ikut terlibat atau berbagi dalam sesuatu hal.

Partisipasi Jamaah akan diukur dengan 3 indikator menurut Suroso (2014) yaitu: 1. keterlibatan masyarakat dalam perencanaan; 2. keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan; dan 3. keterlibatan dalam pengawasan.

Variabel partisipasi jamaah di dalam penelitian ini diukur dengan instrumen yang menggunakan skala Likert dan hasil pengukurannya adalah berupa data dengan skala interval 1 sampai dengan 5. Ukuran partisipasi jamaah didasarkan pada hasil rata-rata dari masing-masing item yang diperoleh dari tanggapan responden terhadap item tersebut, dengan cara memilih salah satu dari skala lima poin yang tersedia. Nilai 1 (satu) menunjukkan partisipasi jamaah sangat tidak berpartisipasi, sebaliknya nilai 5 (lima) menunjukkan partisipasi jamaah sangat berpartisipasi.

### 3.4 Instrumen Penelitian

Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian adalah kuesioner yaitu daftar pertanyaan yang terstruktur yang digunakan untuk mengukur penilaian responden dan fakta-fakta yang berhubungan dengan responden serta dengan keadaan yang telah diketahui responden. Instrumen penelitian terdiri dari daftar

pertanyaan tertutup yang berisi pertanyaan-pertanyaan dengan pilihan jawaban tentang variabel-variabel penelitian dan daftar pertanyaan terbuka dengan jawaban yang harus diisi oleh responden berisi pertanyaan-pertanyaan tentang; pengendalian internal, akuntabilitas, transparansi, kepercayaan jamaah terhadap takmir dan peningkatan jumlah jamaah.

Instrumen penelitian ditujukan kepada 25 jamaah dari masing-masing 5 masjid terbesar yang berada di Kabupaten Lumajang, Jember dan Probolinggo, Jawa Timur yang berjumlah 125 orang responden sebagai sumber informasi. Daftar kuesioner akan diserahkan langsung oleh peneliti kepada responden. Pengisian kuesioner oleh responden didampingi oleh tenaga peneliti untuk membantu menginterpretasikan pertanyaan dalam kuesioner dengan benar.

Tingkat pengukuran atau pemberian nilai untuk masing-masing variabel penelitian yang diidentifikasi adalah menggunakan ukuran interval. Poin-poin dalam skala didefinisikan dengan angka dan mempunyai 5 skala.

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas instrumen penelitian, maka dilakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen. Uji validitas yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah validitas konstruk masing-masing item (indikator), dimana suatu item (indikator) dikatakan valid jika uji hipotesis terhadap *loading factor* positif dan bernilai  $> 0.7$  atau bersifat signifikan ( $p\text{-value} < 0,05$ ). Sedangkan uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *composite reliability*. Instrumen penelitian untuk mengukur sebuah variabel memiliki reliabilitas komposit yang baik jika memiliki *composite reliability*  $> 0.7$ , walaupun bukan merupakan standar absolut.

### 3.5 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di masjid besar yang berada di 5 Kabupaten yaitu Masjid Jami' Anas Mahfudz di Lumajang, Masjid Jami' Ibrahimy di Situbondo, Masjid Agung Attaqwa di Bondowoso, Masjid Jami' AI-Baitul Amien di Jember dan Masjid Agung Baiturrahman di Banyuwangi, Jawa Timur berjumlah 5 masjid besar. Objek penelitian adalah masing-masing 5 masjid besar

dari 5 Kabupaten tersebut. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja atas pertimbangan lokasi dan besarnya objek.

### 3.6 Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian yang dilakukan yaitu tahap pengumpulan data primer (*primary data*) yang diperoleh secara langsung dari para responden, yaitu data yang didapatkan dari jawaban para jamaah masjid yang berkaitan dengan pengendalian internal, akuntabilitas, transparansi, kepercayaan dan partisipasi jamaah.

### 3.7 Teknik Analisis Data

Analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari analisis deskriptif untuk melihat gambaran karakteristik populasi dan analisis jalur. Analisis jalur digunakan untuk pengujian hipotesis dengan menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM). Menurut Ghozali (2005), SEM dianggap sebagai suatu alat statistik yang sangat berguna bagi para peneliti pada bidang ilmu sosial. SEM dapat menguji secara bersama-sama model struktural yaitu hubungan antar variabel dan *model measurement* yaitu hubungan antara indikator dengan variabel latennya.

Menurut Ghozali (2005) jika pengukuran setiap variabel laten masih baru, maka harus lebih menekankan data daripada teori. Oleh karena lebih menitik beratkan pada data dan dengan prosedur estimasi yang terbatas, maka mispesifikasi model tidak begitu berpengaruh terhadap estimase parameter. Walaupun SEM dapat juga digunakan untuk mengkonfirmasi teori, tetapi dapat juga digunakan untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel laten.

### 3.8 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Uji validitas yang digunakan di dalam penelitian ini adalah validitas konstruk masing-masing item (indikator), dimana suatu item (indikator) dikatakan valid jika *outer loading* positif dan bernilai  $> 0.7$  atau uji hipotesis terhadap *outer loading* bersifat signifikan ( $p\text{-value} < 0.05$ ). Uji validitas dimaksudkan untuk



menanyakan serangkaian pertanyaan dengan harapan bahwa pertanyaan tersebut menyentuh konsep dan yakin bahwa peneliti mengukur konsep yang disiapkan dan bukan yang lain.

Uji reliabilitas yang digunakan di dalam penelitian ini adalah *composite reliability*. Uji reliabilitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui konsistensi data yang diperoleh. Instrumen penelitian untuk mengukur sebuah variabel memiliki reliabilitas komposit yang baik jika memiliki *composite reliability*  $> 0.7$ , walaupun bukan merupakan standar mutlak.

### 3.9 Uji Asumsi SEM

#### 3.9.1 Normalitas

Data dikatakan normal apabila membentuk suatu distribusi normal dan juga sebaliknya, data dikatakan tidak normal apabila data tersebut membentuk suatu distribusi yang tidak normal. Untuk menguji dilanggar atau tidaknya asumsi normalitas maka dapat digunakan nilai statistik  $z$  untuk *skewness* dan *kurtosis*nya. Jika nilai  $z$  baik *skewness* dan *kurtosis*nya adalah signifikan (kurang dari 0.05 pada tingkat 5%) maka dapat dikatakan bahwa distribusi data adalah tidak normal. Sebaliknya jika nilai  $z$  tidak signifikan (lebih besar daripada 0.05), maka distribusi data adalah normal (Ghozali, 2005).

### 3.10 Penilaian Model Fit

Suatu model dikatakan fit apabila kovarians matriks suatu model adalah sama dengan kovarians matriks data. Model fit dapat dinilai berdasarkan dengan menguji berbagai index fit (Ghozali, 2005). Berikut merupakan index fit yang digunakan dalam penilaian model fit.

#### 3.10.1 *Chi-square*

Nilai *Chi-square* sebesar 0 menunjukkan bahwa model memiliki fit yang sempurna. Probabilitas *Chi-square* diharapkan tidak signifikan. Nilai *chi-square* yang signifikan ( $< 0,05$ ) menunjukkan bahwa data empiris yang diperoleh memiliki perbedaan dengan teori yang telah dibangun berdasarkan SEM. Sedangkan nilai



probabilitas yang tidak signifikan adalah yang diharapkan, menunjukkan bahwa data empiris sesuai dengan model (Ghozali, 2005).

### 3.10.2 *Goodness of Fit Indices* (GFI)

*Goodness of Fit Indices* (GFI) merupakan suatu ukuran mengenai ketepatan model dalam menghasilkan observed matriks kovarians. Nilai GFI harus berkisar antara 0 dan 1. Nilai GFI yang lebih besar dari 0,9 menunjukkan fit suatu model yang baik (Ghozali, 2005).

### 3.10.3 *Adjusted Goodness of Fit Index* (AGFI)

*Adjusted Goodness of Fit Index* (AGFI) adalah sama seperti GFI, tetapi telah menyesuaikan pengaruh *degree of freedom* pada suatu model. Nilai AGFI sebesar 1 berarti adalah model memiliki *perfect fit*. Sedangkan model yang fit adalah yang memiliki nilai AGFI 0,9 (Ghozali, 2005).

### 3.10.4 *Root Mean Square Error of Approximation* (RMSEA)

RMSEA ini mengukur penyimpangan nilai parameter pada suatu model dengan matriks kovarians populasinya. Nilai RMSEA  $<0,05$  mengindikasikan adanya model fit, nilai berkisar antara 0,08 menyatakan bahwa model memiliki perkiraan kesalahan yang bisa diterima. Sedangkan nilai RMSEA  $>0,1$  mengindikasikan model fit yang jelek (Ghozali, 2005).

### 3.10.5 *RFI (Relative Fit Index)*

Nilai RFI (*Relative Fit Index*) berkisar antara 0 sampai dengan 1. Model dikatakan fit bila mempunyai nilai *Relative Fit Index* yang mendekati angka 1 (Ghozali, 2005).

### 3.10.6 *ECVI (Expected Cross Validation Index)*

ECVI (*Expected Cross Validation Index*) digunakan untuk menilai kecenderungan bahwa model, pada sampel tunggal, dapat divalidasi silang pada ukuran sampel dan populasi yang sama (Browne dan Cudex, 1989 dalam Ghozali, 2005). Model dikatakan baik bila memiliki nilai ECVI model lebih rendah daripada nilai ECVI *for Independence model* dan ECVI *for saturated model* (Byrne, 1998 dalam Ghozali, 2005).

### 3.10.7 *NCP (Non-Centrality Parameter)*

Menurut Ghozali (2005) nilai NCP (*Non-Centrality Parameter*) digunakan untuk menilai tingkat penyimpangan antara *fitted (model) covariance matrix* dan *sample covariance matrix*. Model dikatakan buruk apabila mempunyai nilai NCP yang besar dan sebaliknya model dikatakan baik apabila mempunyai nilai NCP yang kecil.

#### 3.10.8 NFI (*Normed Fit Index*)

*Normed Fit Index* atau NFI, ditemukan oleh Bentler dan Bonetts (1980), merupakan salah satu alternatif untuk menentukan model fit. NFI memiliki kecenderungan untuk merendahkan fit pada sampel yang kecil. Model dikatakan fit apabila memiliki nilai lebih besar 0,9 (Bentler, 1992 dalam Ghozali, 2005).

#### 3.10.9 NNFI (*Non-Normed Fit Index*)

Menurut Bentler (1990) dalam Ghozali (2005) NNFI (*Non-Normed Fit Index*) digunakan untuk mengatasi permasalahan kompleksitas model dalam perhitungan NFI. Batas minimal Nilai NNFI agar model dikatakan fit yaitu 0.90.

#### 3.10.10 CFI (*Comparative Fit Index*)

Model memiliki fit yang baik apabila mempunyai nilai CFI (*Comparative Fit Index*) dengan kisaran yang mendekati 1 dan batas minimal model fit adalah 0.09 (Bentler, 1990 dalam Ghozali, 2005).

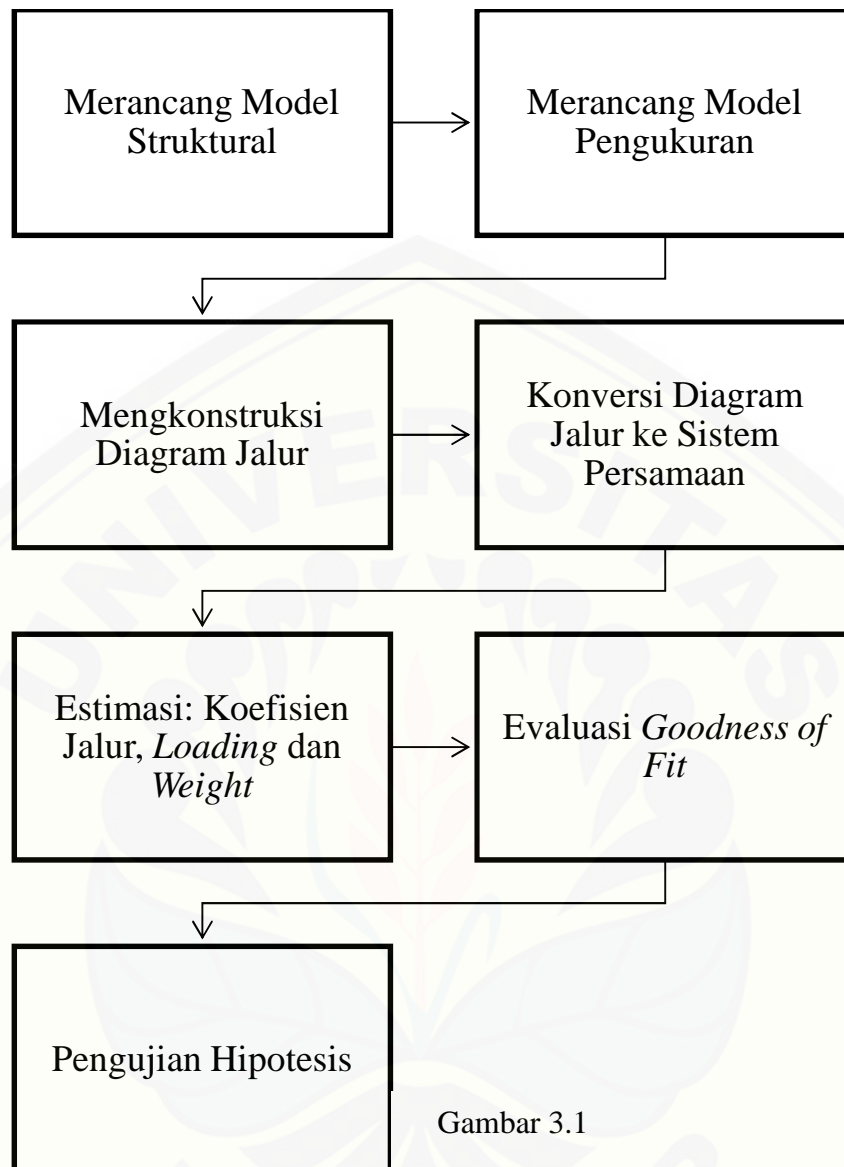
#### 3.10.11 IFI

IFI (*Incremental Fit Index*), diperkenalkan oleh Bollen (1989), digunakan untuk mengatasi parsimony dan ukuran sampel yang berhubungan dengan NFI. Model dikatakan fit bila mempunyai nilai IFI (*Incremental Fit Index*) lebih besar daripada 0.9 (Byrne, 1998 dalam Ghozali, 2005).

### 3.11 Langkah – Langkah Analisis SEM

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan bantuan program komputer LISREL 9.30, dengan alasan bahwa:

1. SEM dapat melakukan analisis faktor, regresi dan jalur sekaligus;
2. Variabelnya laten;
3. Ukuran sample-nya besar sehingga memenuhi untuk menggunakan SEM (*structural equation model*).

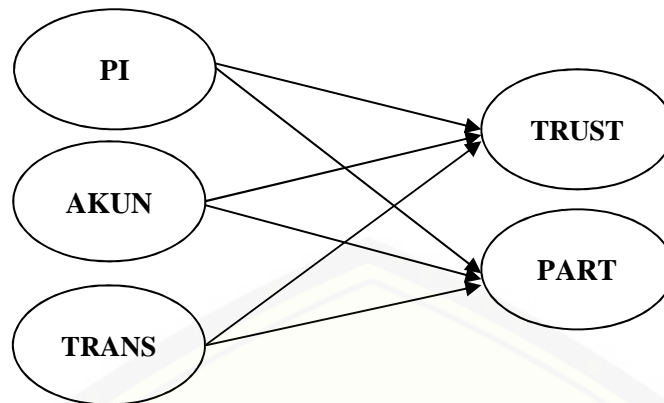


Gambar 3.1

Adapun langkah-langkah di dalam analisis dengan SEM adalah sebagaimana dijelaskan pada gambar 3.1. yaitu:

1. Langkah pertama : merancang model struktural (*inner model*);

Perancangan model struktural hubungan antar variabel laten pada SEM didasarkan pada rumusan masalah atau hipotesis penelitian.



Gambar 3.2 Model struktural pada analisis SEM

Model tersebut dikembangkan untuk menjawab rumusan masalah yang diwujudkan dalam pernyataan hipotesis penelitian. Model tersebut menunjukkan hubungan antara variabel independen dan dependen. Hubungan struktural antar variabel dapat dinyatakan dalam persamaan. Persamaan jalur yang diajukan dalam model konseptual penelitian tampak pada persamaan sebagai berikut:

$$\text{TRUST} = f \{ \text{PI, AKUN, TRANS} \}$$

$$\text{PART} = f \{ \text{PI, AKUN, TRANS} \}$$

Dimana,

PI adalah Pengendalian Internal

AKUN adalah Akuntabilitas

TRANS adalah Transparansi

TRUST adalah kepercayaan jamaah

PART adalah partisipasi jamaah

2. Langkah kedua: merancang model pengukuran (*outer model*);

*Outer model* di dalam penelitian ini semuanya bersifat reflektif yaitu hanya merujuk pada definisi operasional variabel, sesuai dengan proses perancangan instrumen penelitian.

3. Langkah ketiga: penyusunan diagram jalur;

Bilamana langkah satu dan dua sudah dilakukan, maka agar hasilnya lebih mudah dipahami, hasil perancangan *inner model* dan *outer model* tersebut, selanjutnya dinyatakan dalam bentuk diagram jalur.

4. Langkah keempat: konfirmasi diagram jalur ke sistem persamaan;

*Outer model*, yaitu spesifikasi hubungan antara variabel laten dengan indikatornya, disebut juga dengan *outer relation* atau *measurement model*, mendefiniskan karakteristik konstruk dengan variabel manifestasinya. Model indikator dapat ditulis persamaannya sebagai berikut:

Untuk variabel laten Pengendalian Internal

$$PI_1 = 11\xi_1 + \delta_1$$

$$PI_2 = 21\xi_1 + \delta_2$$

$$PI_3 = 31\xi_1 + \delta_3$$

Untuk variabel laten Akuntabilitas

$$AKUN_1 = 42\xi_2 + \delta_4$$

$$AKUN_2 = 52\xi_2 + \delta_5$$

$$AKUN_3 = 62\xi_2 + \delta_6$$

Untuk variabel laten Transparasi

$$TRANS_1 = 73\xi_3 + \delta_7$$

$$TRANS_2 = 83\xi_3 + \delta_8$$

$$TRANS_3 = 93\xi_3 + \delta_9$$

Untuk variabel laten kepercayaan jamaah

$$TRUST_1 = 11\eta_1 + \varepsilon_1$$

$$TRUST_2 = 21\eta_1 + \varepsilon_2$$

$$TRUST_3 = 31\eta_1 + \varepsilon_3$$

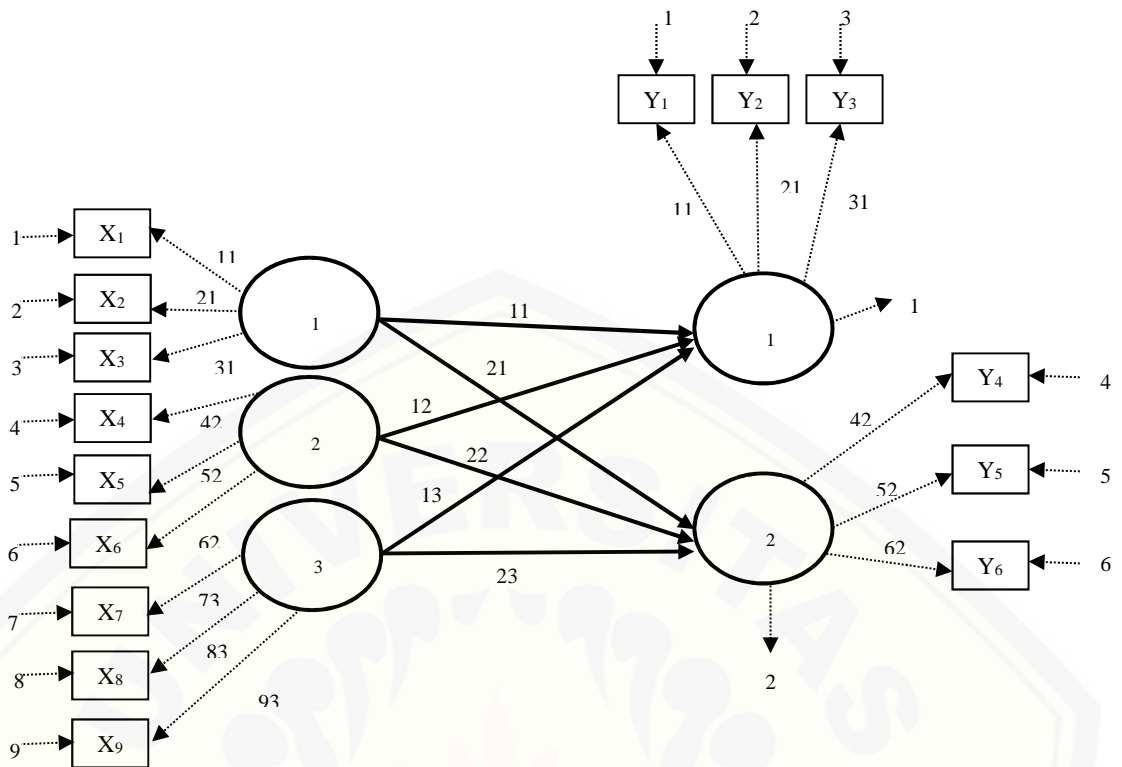
Untuk variabel laten partisipasi jamaah

$$PART_1 = 42\eta_2 + \varepsilon_4$$

$$PART_2 = 52\eta_2 + \varepsilon_5$$

$$PART_3 = 62\eta_2 + \varepsilon_6$$





Gambar 3.3 Diagram jalur lengkap

Keterangan:

- PI = Pengendalian Internal
- AKUN = Akuntabilitas
- TRANS = Transparansi
- TRUST = kepercayaan jamaah
- PART = partisipasi jamaah
- = Variabel Laten
- = Indikator
- = Pengaruh
- ⋯→ = Dibentuk

*Inner model*, yaitu menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan teori substantif penelitian.

$$\eta_1 = \gamma_{11}\xi_1 + \gamma_{12}\xi_2 + \gamma_{13}\xi_3 + \zeta_1$$

$$\eta_2 = \gamma_{21}\xi_1 + \gamma_{22}\eta_1 + \gamma_{23}\xi_3 + \zeta_2$$

5. Langkah kelima: estimasi parameter : koefisien jalur, *loading* dan *weight*;  
Metode pendugaan estimasi parameter di dalam SEM adalah metode *Maximum Likelihood* (ML). *Maximum Likelihood* akan menghasilkan estimasi parameter yang valid, efisien dan reliabel apabila data yang digunakan adalah normalitas multivariate dan tidak terpengaruh oleh penyimpangan multivariate yang sedang (Ghozali, 2005).
6. Langkah keenam: penilaian model fit;  
Penilaian model fit dilakukan dengan menggunakan 11 ukuran fit yaitu chi-square, NCP, ECVI, NFI, NNFI, CFI, IFI, RFI, GFI, AGFI dan RMSEA.
7. Langkah ketujuh: pengujian hipotesis.  
Pengujian hipotesis dilakukan dengan t-test, bilamana diperoleh nilai *critical ratio* lebih dari 2,58 pada taraf signifikansi 1%, 1,96 untuk signifikansi sebesar 5% atau 2,58 untuk signifikansi sebesar 10% dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan variabel laten satu terhadap variabel laten lainnya (Ghozali, 2005).

## BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini akan akan merangkum hasil pembahasan dan pengujian hipotesis yang telah dijelaskan pada bab empat, implikasi, serta saran yang sebaiknya dilakukan pada penelitian selanjutnya.

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan kesimpulan yang dapat diambil adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pengendalian internal terhadap kepercayaan jamaah adalah tidak signifikan. Hal ini berarti bahwa hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa pengendalian internal mempengaruhi kepercayaan jamaah ditolak. Secara teori berarti temuan ini mempunyai arti bahwa pengendalian internal tidak berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan jamaah. Tinggi atau rendahnya kepercayaan jamaah ternyata dalam organisasi bidang keagamaan tidak terpengaruh oleh pengendalian internal dari organisasi tersebut. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kepercayaan jamaah, ternyata pengendalian internal bukanlah merupakan salah satu faktor yang menentukan. Hasil temuan menunjukkan bahwa praktek yang ada dalam organisasi keagamaan tidak sama atau tidak sesuai dengan teori yang ada. Temuan ini memperkaya teori sosial profetik menurut Kuntowidjojo (1991). Temuan dalam penelitian ini tidak mendukung atau tidak sesuai dengan temuan Sofia (2017).

Hasil penelitian menunjukkan pengaruh akuntabilitas terhadap kepercayaan jamaah adalah tidak signifikan. Hal ini berarti bahwa hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa akuntabilitas mempengaruhi kepercayaan jamaah ditolak. Secara teori berarti temuan ini mempunyai arti bahwa akuntabilitas tidak berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan jamaah. Akuntabilitas yang ada dalam organisasi keagamaan atau dalam hal ini adalah masjid ternyata tidak mempunyai pengaruh terhadap kepercayaan dari organisasi pada bidang ini. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kepercayaan jamaah, ternyata akuntabilitas bukanlah merupakan salah satu faktor yang penting. Hasil

temuan menunjukkan bahwa praktek yang ada dalam organisasi keagamaan tidak sama atau tidak sesuai dengan teori yang ada. Temuan ini memperkaya *syariah enterprise theory* yang dikemukakan oleh Triyuwono (2007). Temuan dalam penelitian ini tidak mendukung atau tidak sesuai dengan temuan Hyndman (2017). Temuan dalam penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Sofia (2017).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh transparansi terhadap kepercayaan jamaah adalah signifikan positif. Hal ini berarti bahwa hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa transparansi mempengaruhi kepercayaan jamaah diterima. Secara teori berarti temuan ini mempunyai arti bahwa transparansi mempunyai peran yang penting dalam meningkatkan kepercayaan jamaah. Transparansi yang ada dalam masjid dan juga organisasi keagamaan lain ternyata mempunyai pengaruh terhadap kepercayaan dari organisasi pada bidang keagamaan. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa transparansi merupakan salah satu faktor yang penting dalam meningkatkan kepercayaan jamaah. Hasil temuan menunjukkan bahwa teori dan praktek yang ada dalam organisasi keagamaan adalah sama atau sesuai. Temuan ini memperkaya teori pemangku kepentingan menurut Chan (2014). Temuan dalam penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Hyndman (2017).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pengendalian internal terhadap partisipasi jamaah adalah tidak signifikan. Hal ini berarti bahwa hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa pengendalian internal mempengaruhi partisipasi jamaah ditolak. Secara teori berarti temuan ini mempunyai arti bahwa pengendalian internal tidak berperan penting dalam meningkatkan partisipasi jamaah. Tinggi atau rendahnya partisipasi jamaah ternyata dalam organisasi bidang keagamaan tidak terpengaruh oleh pengendalian internal dari organisasi tersebut. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan partisipasi jamaah, ternyata pengendalian internal bukanlah merupakan salah satu faktor yang menentukan. Hasil temuan menunjukkan bahwa praktek yang ada dalam organisasi keagamaan tidak sama atau tidak sesuai dengan teori yang ada. Temuan ini memperkaya *syariah enterprise theory* yang dikemukakan oleh Triyuwono (2007).

Temuan dalam penelitian ini tidak mendukung atau tidak sesuai dengan temuan Dow (2012).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh akuntabilitas terhadap partisipasi jamaah adalah signifikan dan bernilai negatif. Hal ini berarti bahwa hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa transparansi mempengaruhi partisipasi jamaah diterima. Secara teori berarti temuan ini mempunyai arti bahwa transparansi mempunyai peran yang signifikan dalam menurunkan partisipasi jamaah. Transparansi yang ada dalam masjid dan juga organisasi keagamaan lain ternyata mempunyai pengaruh terhadap partisipasi jamaah dari organisasi pada bidang keagamaan. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa transparansi merupakan salah satu faktor yang penting dalam meningkatkan partisipasi jamaah. Hasil temuan menunjukkan bahwa teori dan praktek yang ada dalam organisasi keagamaan adalah sama atau sesuai. Temuan ini memperkaya *theory of reasoned action* menurut Lee dan Kotler (2011). Temuan dalam penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Weeger (2015).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh transparansi terhadap partisipasi jamaah adalah tidak signifikan. Hal ini berarti bahwa hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa transparansi mempengaruhi partisipasi jamaah ditolak. Secara teori berarti temuan ini mempunyai arti bahwa transparansi tidak berperan penting dalam meningkatkan partisipasi jamaah. Transparansi yang ada dalam organisasi keagamaan atau dalam hal ini adalah masjid ternyata tidak mempunyai pengaruh terhadap partisipasi jamaah dari organisasi pada bidang ini. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan partisipasi jamaah, ternyata transparansi bukanlah merupakan salah satu faktor yang penting. Hasil temuan menunjukkan bahwa praktek yang ada dalam organisasi keagamaan tidak sama atau tidak sesuai dengan teori yang ada. Temuan ini memperkaya *syariah enterprise theory* yang dikemukakan oleh Triyuwono (2007). Temuan dalam penelitian ini tidak mendukung atau tidak sesuai dengan temuan Dow (2012) dan Weeger (2015).



## 5.2 Implikasi Penelitian

Pada penelitian ini banyak menunjukkan hasil yang tidak sesuai dengan teori karena banyak hasil pengujian hipotesis yang menyatakan bahwa beberapa hipotesis tidak terdapat pengaruh antar variabel. Karena itulah implikasi dari penelitian ini akan banyak berbeda dari apa yang sebenarnya diharapkan oleh peneliti karena ketidaksesuaian antara teori dan hasil penelitian yang sudah dilakukan. Hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi, antara lain:

### 1. Implikasi terhadap pengembangan teori akuntansi syariah

Pengujian terhadap teori dalam penelitian ini dapat menambah kekayaan penelitian di bidang akuntansi syariah yang berkaitan dengan pengendalian internal, akuntabilitas, transparansi dan kepercayaan jamaah terhadap kepercayaan dan partisipasi jamaah. Implikasi lainnya terhadap pengembangan teori akuntansi syariah bahwa ternyata teori dan penelitian tentang pengendalian internal, akuntabilitas, transparansi dan kepercayaan jamaah yang diajukan dalam penelitian ini ternyata tidak semuanya sesuai dengan kondisi di Indonesia, perlu digali lebih dalam lagi apakah yang menyebabkan ketidaksesuaian antara teori dan penelitian terdahulu dengan terhadap tersebut bila diterapkan pada masjid di Indonesia dapat disebabkan adanya perbedaan demografis dan mungkin juga pola pikir jamaah yang berbeda disebabkan budaya yang berbeda pula.

### 2. Implikasi terhadap pengurus atau takmir masjid terhadap pengelolaan atau manajemen masjid

Pengurus atau takmir masjid akan dapat mengetahui bahwa pengendalian internal, akuntabilitas dan transparansi tidak begitu mempengaruhi kepercayaan dan partisipasi jamaah. Kebanyakan para jamaah dan donatur mempunyai kepercayaan yang “membabi buta” terhadap pengelolaan dana yang dilakukan oleh takmir masjid karena menganggap hal yang berkaitan dengan agama jadi tidak perlu dipertanyakan. Hal ini sebaliknya bagi takmir masjid tidak menjadi sebuah keteledoran, justru kepercayaan tersebut harus membuat pengurus masjid untuk lebih transparan dalam pengelolaan dana yang dilakukan untuk menjawab kepercayaan jamaah tersebut.

### 3. Implikasi terhadap cara pandang Jamaah kepada Masjid

Dengan melihat penelitian ini, jamaah masjid juga akan dapat mengetahui bahwa pengendalian internal, akuntabilitas dan transparansi tidak begitu mempengaruhi kepercayaan dan partisipasi jamaah. Kebanyakan para jamaah menganggap bahwa masjid hanya sebagai sebuah tempat untuk beribadah dan dana hasil dari donasi para jamaah terhadap masjid sepenuhnya sudah menjadi tanggung jawab pengurus masjid. Jamaah masjid seharusnya juga ikut berperan dalam mengawasi bagaimana dana tersebut dikelola. Sebagian besar jamaah tidak memperdulikan bagaimana dana tersebut dikelola. Dengan melihat penelitian ini, jamaah seharusnya menyadari bahwa pengawasan pengelolaan dana masjid juga menjadi tanggung jawab mereka.

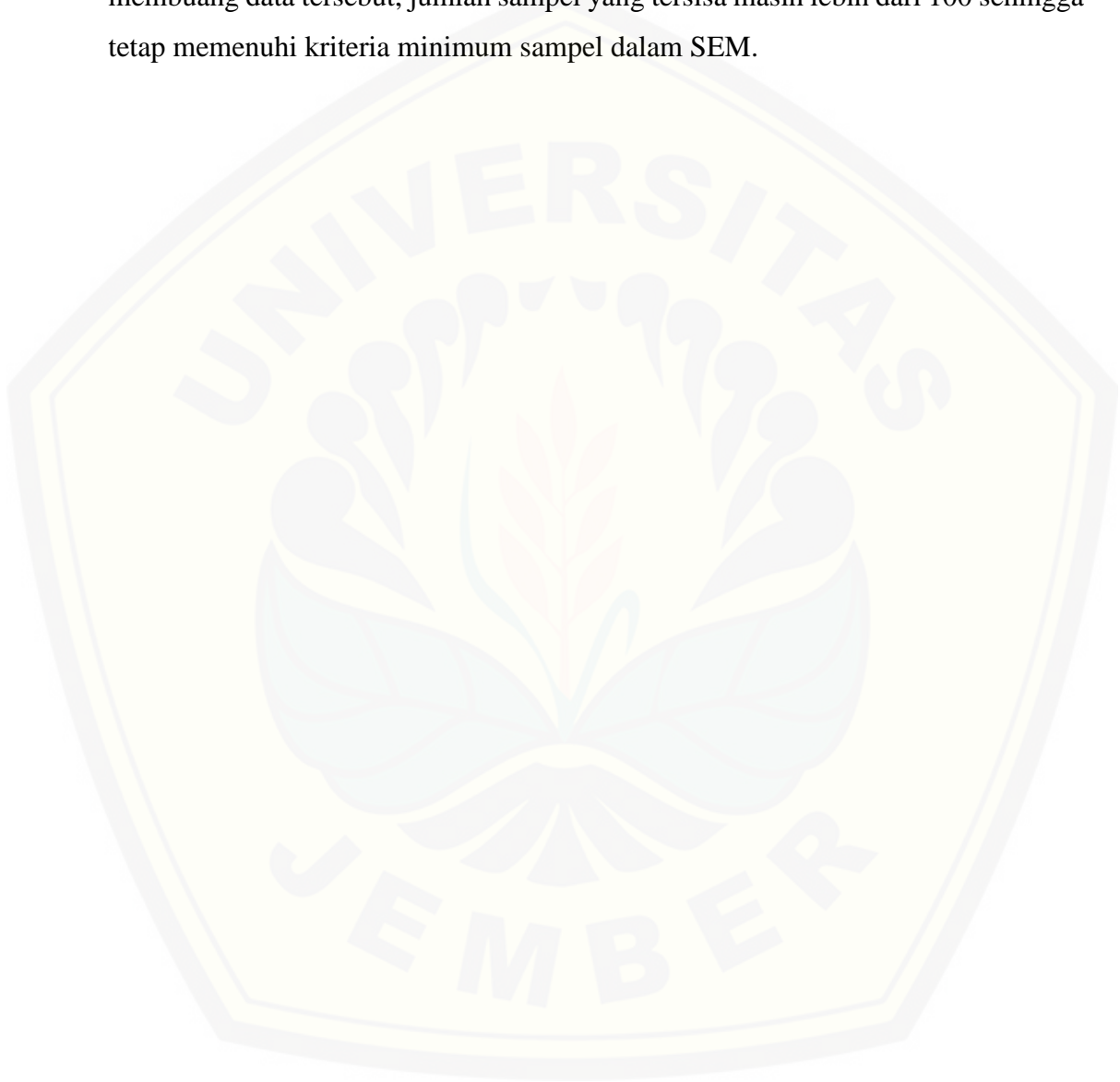
### 5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yaitu data di analisis pada keadaan tidak normal, meskipun hal itu tidak menjadi masalah karena LISREL dapat menganalisis data dalam keadaan tidak normal dengan syarat – syarat tertentu yang harus dipenuhi. Keterbatasan yang lain adalah terdapatnya negatif *error variance* atau yang biasa disebut *heywood case* pada salah satu variabel penelitian ini sehingga peneliti harus mengatur secara manual *error variance* dari salah satu persamaan. Keterbatasan selanjutnya yaitu sampel penelitian yang berjumlah 120 jamaah dirasa kurang karena apabila ingin membuang data *outlier* jumlah sampel menjadi kurang dari 100 sehingga tidak memenuhi kriteria minimum sampel dalam SEM.

### 5.4 Saran

Saran terhadap penelitian selanjutnya adalah untuk menggunakan data yang berdistribusi normal, meskipun apabila data berdistribusi tidak normal hal itu tidak menjadi masalah karena LISREL dapat menganalisis data dalam keadaan tidak normal dengan syarat – syarat tertentu, agar dapat diketahui apakah perbedaan normalitas dapat mempengaruhi hasil penelitian. Saran selanjutnya yaitu agar pada penelitian selanjutnya menghilangkan adanya negatif *error variance* atau yang

biasa disebut *heywood case*. Meskipun terdapat solusi untuk mengatasinya namun hasil penelitian akan lebih baik bila tidak terdapat permasalahan *heywood case* tersebut. Saran terakhir yaitu dengan meningkatkan sampel hingga mencapai 150 atau 200an sampel. Hal ini dikarenakan apabila terdapat data *outlier* dan ingin membuang data tersebut, jumlah sampel yang tersisa masih lebih dari 100 sehingga tetap memenuhi kriteria minimum sampel dalam SEM.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Acharya, A. S., Prakash, A., Saxena, P. dan Nigam, A. (2013). Sampling: Why and how of it. *Indian Journal of Medical Specialities*, 4(2), 330-333.
- Afifuddin, H. B., & Siti-Nabiha, A. K. (2010). Towards good accountability: The role of accounting in Islamic religious organisations. *World Academy of Science, Engineering and Technology*, 66, 1133-1139.
- Ajzen, I. (2012). Martin Fishbein's Legacy: The Reasoned Action Approach. *ANNALS, AAPSS*, 640, 11-27.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. Departemen Agama Republik Indonesia. Jakarta.
- Alim, A. P. dan Abdullah, S. R. (2010). *Audit Pengurusan Masjid : Kajian di Daerah Pasir Putih, Kelantan*. Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository : 1-7.
- Andarsari, P.R. (2016). Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Lembaga Masjid). *Jurnal Ekonomi Universitas Kediri*, 1(2), 143-152.
- Andayani, W. (2011). *Audit internal edisi 1*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Amudo, A., Inanga, E. L. (2009). Evaluation of Internal Control Systems: A Case Study from Uganda. *International Research Journal of Finance and Economics*, 27: 124-144.
- Anindyta, A. P. (2017). *Analisis praktik manajemen keuangan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pada masjid al-Akbar Surabaya*. (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Askary, S. dan Clarke, F. (1997). Accounting in the Koranic Verses. *Proceedings of 'The Vehicle for Exploring and Implementing Shariah Islami'iah in Accounting, Commerce and Finance Conference*. University of Western Sydney :Macarthur.
- Aziz, M.A., Rahman, H.A., Alam, M.M. dan Said, J. (2015). Enhancement of the Accountability of Public Sectors through Integrity System, Internal Control System and Leadership Practices: A Review Study. *Procedia Economics and Finance*, 28, 163 – 169.

- Berardi, L., Rea, M. A. (2010). E-learning for accountability in nonprofit organizations A networked collaborative learning experience for managers of Blood Donors'. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 2 : 2126–2130.
- Chan, J. Y. (2014). Fine-tuning language policy in Hong Kong education: stakeholders' perceptions, practices and challenges. *Language and Education*, 28(5), 459-476.
- Chenhall, R. H, Hall, M., Smith, D. (2010). Social capital and management control systems: A study of a non-government organization. *Accounting, Organizations and Society*, 35 :737–756.
- Clarkson, M. E. (1995). A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social performance. *Academy of management review*, 20(1), 92-117.
- Cordery, C. (2013). Regulating Small and Medium Charities: Does It Improve Transparency and Accountability?. *Voluntas*, 24, 831–851.
- Deng, C., Xiao, Z. dan Zhou, L. (2017). Information systems and internal control: evidence from China. *Electronic Commerce Research*, 17(3), 361–377.
- Dow, K. E., Watson, M. W., Greenberg, P. S. dan Greenberg, R. H. (2012). Understanding participation: Situational participation, intrinsic involvement, and influence. In *Advances in Management Accounting* (pp. 25-47). Emerald Group Publishing Limited.
- Duh, R. R., Chen, K. T., Lin, R. C., dan Kuo, L. C. (2014). Do internal controls improve operating efficiency of universities?. *Annals of Operations Research*, 221(1), 173-195.
- Febriadi, S. R. (2017). Aplikasi Maqashid Syariah dalam Bidang Perbankan Syariah. *AMWALUNA*, 1(2), 231-245.
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). *Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Freeman, R. E. (1999). Divergent stakeholder theory. *Academy of management review*, 24(2), 233-236.



- Gambling, T., Jones, R. and Karim, R.A. (1993). Credible organizations: self-regulation vexternal standard setting in Islamic banks and British charities. *Financial Accountability and Management*, 9 (3), 195-207.
- Ghozali, I dan Fuad. (2005). *Structural Equation Modelling: Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan Program Lisrel 8.54*. Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Ghulam, Z. (2016). Implementasi Maqashid Syariah dalam Koperasi Syariah. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 90-112.
- Haan, J. dan Oosterloo, S. (2006). Transparency and accountability of central banks in their role of financial stability supervisor in OECD countries. *Eur J Law Econ*, 22, 255–271.
- Haniffa, R. and Hudaib, M. (2011). *A theoretical framework for the development of the Islamic perspective of accounting*. In C. Napier and R. Haniffa (eds), *Islamic Accounting*, Edward Elgar Publishing Ltd.
- Henri, J. F., Journeault, M. (2010). Eco-control: The influence of management control systems on environmental and economic performance. *Accounting, Organizations and Society*, 35: 63–80.
- Hery. (2013). *Auditing (Pemeriksaan Akuntansi I), Cetakan Pertama*. Jakarta :CAPS.
- Hunziker, S. (2017). Efficiency of internal control: evidence from Swiss non-financial companies. *Journal of Management & Governance*, 21(2), 399-433.
- Hyndman, N., & McConville, D. (2017). Trust and accountability in UK charities: Exploring the virtuous circle. *The British Accounting Review*.
- Ishak, A. dan Zhafitri, L. (2011). Pengaruh Kepuasan dan Kepercayaan Konsumen terhadap Loyalitas : Studi Tentang Peran Mediasi Switching Costs. *Jurnal siasat bisnis*, 15(1), 55-66.
- Jamaa, L. (2013). Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqashid al-Syari'ah. *ASY-SYIR'AH: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 45(2).
- Jokipii, A. (2009). Determinants and consequences of internal control in firms: a contingency theory based analysis. *Journal Management Governance*, 14: 115–144.

- Kemenag. (2019a, 07 November). *Masjid Al-Baitul Amien*. Diperoleh dari <http://simas.kemenag.go.id/>.
- Kemenag. (2019b, 07 November). *Masjid Agung Attaqwa*. Diperoleh dari <http://simas.kemenag.go.id/>.
- Kemenag. (2019c, 07 November). *Masjid Jami' Anas Mahfudz*. Diperoleh dari <http://simas.kemenag.go.id/>.
- Kemenag. (2019d, 07 November). *Masjid Jami' Ibrahimy*. Diperoleh dari <http://simas.kemenag.go.id/>.
- Kemenag. (2019e, 07 November). *Masjid Agung Baiturrahman*. Diperoleh dari <http://simas.kemenag.go.id/>.
- Kim, D., Ferrin, D., dan Rao, R. (2003a). Antecedents of consumer trust in B-to-C electronic commerce. *AMCIS 2003 Proceedings*, 21.
- Kim, D., Lee, K. Y., Lee, D., Ferrin, D., dan Rao, R. (2003b). Trust, Risk and Benefit in Electronic Commerce: What Are the Relationships?. *AMCIS 2003 Proceedings*, 22.
- Komarudin, K. dan Yudo, S. (2011). Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Kasus Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah Domestik. *Jurnal Air Indonesia*, 5(1).
- Kuntowidjojo, A. (1991). *Paradigma Islam: interpretasi untuk aksi*. Mizan.
- Lee, N. R. dan Kotler, P. (2011). *Social marketing: Influencing behaviors for good*. Sage.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mayer, R.C., Davis, J. H., dan Schoorman, F. D.(1995). An Integratif Model of Organizational Trust. *Academy of Management Review*, 30 (3), 709-734.
- Moeller, R.R. (2009). *Brink's Modern Internal Auditing: A Common Body of Knowledge 7th Ed*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Mohammed, I.S., Aziz, N.H., Masrek, M.N., dan Daud, N.M. (2014). Mosque Fund Management Issues on Accountability and Internal Controls. *Procedia Social and Behavioral Sciences* , 145, 189-194.

- Mohamed, M.A. (2014). Internal Financial Controls Practices of District Mosques in Central Region of Malaysia. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 5(3), 255.
- Mozumder, N.A. (2016). A Multilevel Trust-based Model of Ethical Public Leadership. *Journal of Business Ethics*, 1-18.
- Munawwir, A. W., & Munawwir, Z. A. (1984). *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*. Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan, Pondok Pesantren" Al-Munawwir".
- Nahdloh. (2016). *Bukan Demak, Tapi Lumajang Kerajaan Islam Tertua Di Jawa*. <http://www.nahdloh.com/bukan-demak-lumajang-kerajaan-islam-tertua-jawa/>. [Diakses pada tanggal 16 Mei 2018].
- Novarela, D. dan Sari, I.M. (2015). Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah dalam Perspektif Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 2(2), 145-160.
- O'Neill, O. (2006). Transparency and the ethics of communication. In C. Hood, & D. Heald (Eds.), *Transparency: The key to better Governance?*. *Proceedings of the british academy*, 135, 75-90.
- Oni, A. A., Oni, S., Mbarika, V. dan Ayo, C. K. (2017). Empirical study of user acceptance of online political participation: Integrating Civic Voluntarism Model and Theory of Reasoned Action. *Government Information Quarterly*, 34(2), 317-328.
- Palmer, P., dan Randall, A. (2002). *Financial Management in the Voluntary Sector: New Challenges*. London: Rutledge.
- Rahim, A., Goddard and Andrew (2003). Accountability Verstehen: A Study of Accounting in State Religious Councils in Malaysia, *Discussion Paper in Accounting and Finance, International Islamic University Malaysia*.
- Rakhmawati, N.A., Wibowo, R.P. dan Amir, M.I. (2015). Visualisation Application Development for Mosque Financial Report Using Linked Data and Crowd Sourcing. *Procedia Computer Science*, 72, 374-381.

- Roberts, J. dan Scapens, R. (1985). Accounting systems and systems of accountability - Understanding accounting practices in their organisational context. *Accounting, Organisations and Society*, 10 (4), 443-456.
- Roberts, R. W. (1992). Determinants of corporate social responsibility disclosure: An application of stakeholder theory. *Accounting, organizations and society*, 17(6), 595-612.
- Said, J., Mohamed, A., MohdSanusi, Z., and Syed Yusuf, S.N. (2013). Financial Management Practices in Religious Organizations: An Empirical Evidence of Mosque in Malaysia. *International Business Research*, 6(7), 111-119.
- Salwani, M.I., Aziz, N. H., Masrek, M. N., & Daud, N. M. (2014). Mosque fund management: issues on accountability and internal controls. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 145, 189-194.
- Sanusi, Z. M., Johari, R. J., Said, J. dan Iskandar, T. (2015). The Effects of Internal Control System, Financial Management and Accountability of NPOs: The Perspective of Mosques in Malaysia. *Procedia Economics and Finance*, 28, 156-162.
- Shidiq, G. (2018). Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44(118), 117-130.
- Siino, R. M. (2004). *Playing Loose with God's Money*. Stanford Social Innovation Review, 2(1), 14-15. The Committee of Sponsoring Organizations (COSO) of the Treadway Commission, Internal Control-Integrated Framework 4 (New York: AICPA,1992).
- Simanjuntak, D.A. dan Januarsi, Y. (2011). Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid. *Simposium Nasional Akuntansi XIV. Aceh*.
- Sofia, Y.R.H. (2017). Accountability and narrative disclosure by Muslim charity organisations in the UK. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 8(1), 1-30.
- Sulaiman, M., Siraj, S. A. dan Ibrahim, S. H. M. (2008). Internal control systems in West Malaysia's state mosques. *American Journal of Islamic Social Sciences*, 25(1), 63.



- Suroso, H., Hakim, A., dan Noor, I. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. *WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora*, 17(1), 7-15.
- Sutedjo (2009). *Persepsi Stakeholders Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah (Studi Kasus di Sekolah Menengah Pertama Standar Nasional Kabupaten Kendal)*. Tesis S-2 pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- Torres L. dan Pina, V. (2003). Accounting for accountability and management in NPOs: a comparative study of four countries: Canada, the United Kingdom, the USA and Spain. *Financial Accountability and Management*, 19(3), 265–85.
- Triyuwono, I. (2007). Mengangkat "sing liyan" untuk Formulasi Nilai Tambah Syaria"ah. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makasar.
- Ullmann, A. A. (1985). Data in search of a theory: A critical examination of the relationships among social performance, social disclosure, and economic performance of US firms. *Academy of management review*, 10(3), 540-557.
- Van der Laan Smith, J., Adhikari, A., & Tondkar, R. H. (2005). Exploring differences in social disclosures internationally: A stakeholder perspective. *Journal of Accounting and Public Policy*, 24(2), 123-151.
- Wahab, A.A. (2008). *Financial Management of Mosques in Kota Setar District : Issues and Challenges*. College of Business Universiti Utara Malaysia.
- Watts, S. (2015). Corporate social responsibility reporting platforms: enabling transparency for accountability. *Information Technology and Management*, 16(1), 19-35.
- Weeger, A., Wang, X., Gewalt, H., Raisinghani, M., Sanchez, O., Grant, G. dan Pittayachawan, S. (2015). Determinants of intention to participate in corporate BYOD-Programs: The case of digital natives. *Information Systems Frontiers*, 1-17.



Wulandari, A. (2010). Menggagas Konsep Good Corporate Governance dalam Konstruksi Syariah. *Pamator*, 3(1), 75-88.



**LAMPIRAN 1.1 KUESIONER PENELITIAN**Kuesioner Penelitian

Yth,  
Bapak/Ibu/Sdr/i Jamaah Masjid  
Di tempat

Dengan hormat,  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riza Ramadhan  
NIM : 160820301022  
Prodi : Magister Akuntansi  
Perguruan Tinggi : Universitas Jember

Memohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i Jamaah Masjid untuk kiranya dapat berpartisipasi dalam mengisi kuesioner penelitian berikut, berkaitan dengan penyusunan tesis yang saya lakukan dalam rangka menyelesaikan program studi Akuntansi S2 Fakultas Ekonomi Universitas Jember dengan judul **“Peran Maqashid Syari’ah Terhadap Kepercayaan dan Partisipasi Jamaah Pada Hubungan Pengelolaan Dana Masjid”**.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat. Oleh karena itu dimohon kesediaannya untuk mengisi/menjawab kuesioner ini dengan sejujur-jujurnya. Kuesioner ini hanya untuk keperluan tesis tidak untuk dipublikasikan secara luas, sehingga kerahasiaan data yang diisi dapat dijaga.

Atas kerjasama yang baik dan kesungguhan Bapak/Ibu/Sdr/i Jamaah Masjid dalam mengisi kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih.

Contact Person : 082234252143

Hormat saya,

Riza Ramadhan

## Identitas Responden

1. Nama :
2. Umur : Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan
4. Masjid :

## Petunjuk Pengisian :

Berikut merupakan pertanyaan-pertanyaan yang mewakili pendapat-pendapat umum mengenai kondisi di dalam masjid tempat anda beribadah. Tidak ada pernyataan yang benar atau salah. Saudara mungkin saja setuju atau tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan tersebut. Kami ingin mengetahui seberapa jauh saudara setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan tersebut, dengan memberi tanda checklist (√) pada pilihan yang tersedia sebagai berikut :

## Penilaian :

- SS : Sangat Setuju  
 S : Setuju  
 N : Netral  
 TS : Tidak Setuju  
 STS : Sangat Tidak Setuju

## Daftar Pertanyaan Kuesioner

Pengendalian Internal						
No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Pengurus Masjid mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang berbeda satu dengan yang lainnya					
2	Pengurus Masjid melakukan prosedur pencatatan pemasukan dan pengeluaran dana masjid/infak					
3	Pengurus masjid memberikan kemudahan akses bagi donatur maupun jamaah masjid untuk memperoleh informasi.					
Akuntabilitas (Pertanggung jawaban)						
1	Pengurus masjid jujur dan memperhatikan hukum islam dalam mengelola dana jamaah (infak, sedekah dari kotak amal atau sumbangan)					

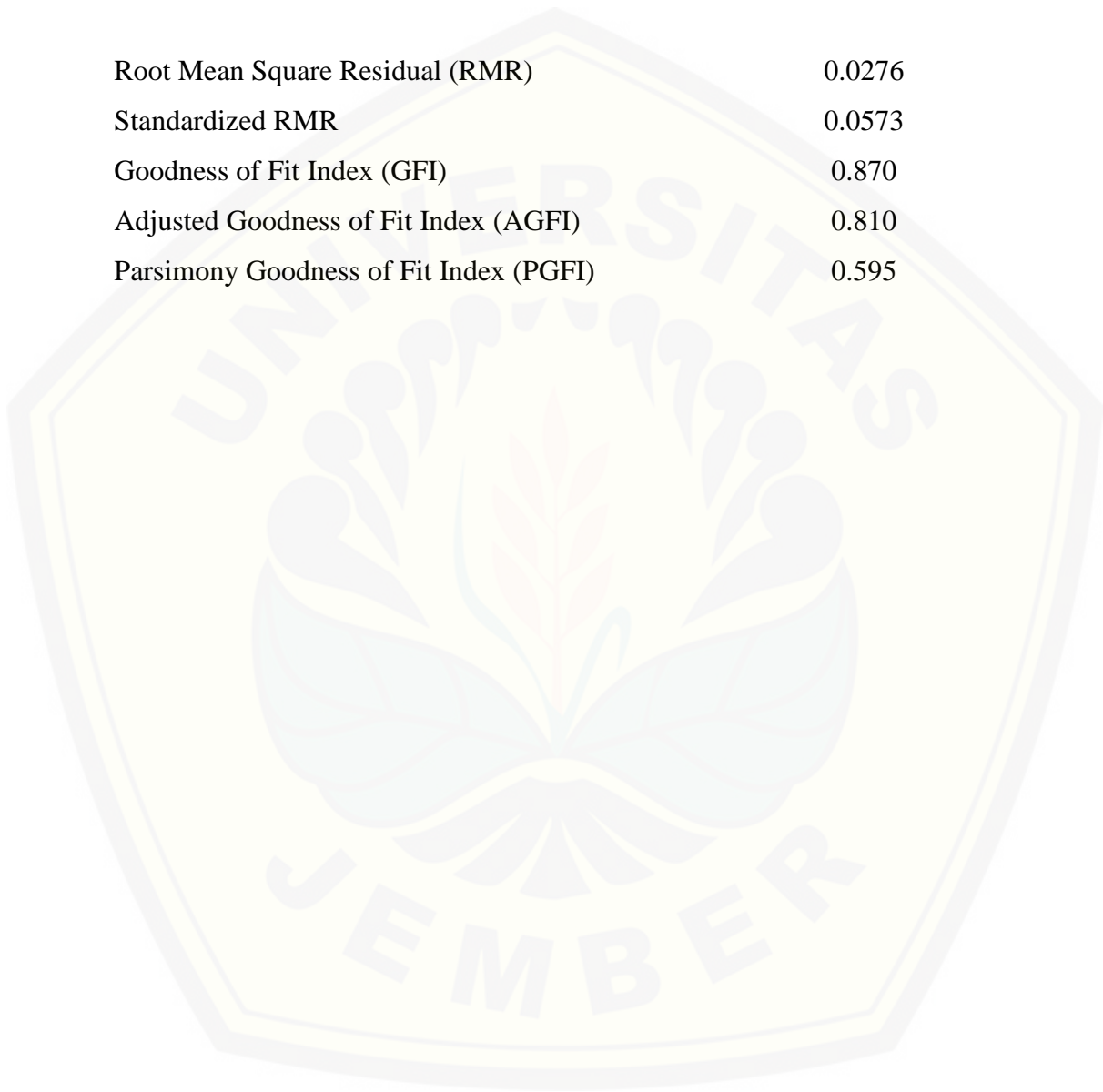
2	Pengurus masjid mengelola dana jamaah (infaq, sedekah dari kotak amal atau sumbangan) dengan baik dan benar					
3	Pengurus masjid bertanggung jawab terhadap kegiatan dan program yang telah direncanakan					
<b>Transparansi (Keterbukaan)</b>						
1	Pengurus masjid menyediakan informasi pengelolaan dana masjid/infaq secara tepat waktu, memadai, jelas, dan akurat					
2	Pengurus masjid menyediakan informasi terkait dengan dana jamaah (infaq dan sedekah dari kotak amal atau sumbangan) dengan lengkap.					
3	Pengurus masjid menyediakan informasi yang berkesinambungan (terjadwal, misal setiap juma't seminggu sekali) terkait dengan dana jamaah (infaq dan sedekah dari kotak amal atau sumbangan).					
<b>Kepercayaan Jamaah</b>						
1	Takmir masjid (bagi yang bertugas mengelola dana masjid) mempunyai kemampuan yang memadai dalam pencatatan, penghitungan dan pengelolaan dana jamaah (infaq dan sedekah dari kotak amal atau sumbangan)					
2	Pengurus masjid memberikan layanan konsultasi terhadap donator, jamaah masjid maupun masyarakat					
3	Pengurus masjid menghargai dan menghormati semua pihak, termasuk donator dan jamaah masjid					
<b>Partisipasi Jamaah</b>						
1	Sebagai anggota Jamaah Masjid, saya terlibat dalam penyusunan rancangan rencana kegiatan kegiatan masjid					
2	Sebagai anggota Jamaah Masjid, saya terlibat dalam pelaksanaan dan berpartisipasi dalam kegiatan masjid					
3	Sebagai anggota Jamaah Masjid, saya terlibat dalam mengawasi kelancaran kegiatan masjid					

**LAMPIRAN 1.2 Goodness-of-Fit Statistics**

Degrees of Freedom for (C1)-(C3)	82
Maximum Likelihood Ratio Chi-Square (C1)	137.643 (P = 0.0001)
Browne's (1984) ADF Chi-Square (C2_NT)	134.343 (P = 0.0002)
Browne's (1984) ADF Chi-Square (C2_NNT)	494.511 (P = 0.0000)
Satorra-Bentler (1988) Scaled Chi-Square (C3)	99.358 (P = 0.0932)
Satorra-Bentler (1988) Adjusted Chi-Square (C4)	32.174 (P = 0.2081)
Degrees of Freedom for C4	26.553
Estimated Non-centrality Parameter (NCP)	55.643
90 Percent Confidence Interval for NCP	(27.182 ; 91.990)
Minimum Fit Function Value	1.147
Population Discrepancy Function Value (F0)	0.464
90 Percent Confidence Interval for F0	(0.227 ; 0.767)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)	0.0752
90 Percent Confidence Interval for RMSEA	(0.0526 ; 0.0967)
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05)	0.0352
Expected Cross-Validation Index (ECVI)	1.780
90 Percent Confidence Interval for ECVI	(1.543 ; 2.083)
ECVI for Saturated Model	2.000
ECVI for Independence Model	8.559
Chi-Square for Independence Model (105 df)	997.052
Normed Fit Index (NFI)	0.900
Non-Normed Fit Index (NNFI)	0.975
Parsimony Normed Fit Index (PNFI)	0.703
Comparative Fit Index (CFI)	0.981



Incremental Fit Index (IFI)	0.981
Relative Fit Index (RFI)	0.872
Critical N (CN)	138.374
Root Mean Square Residual (RMR)	0.0276
Standardized RMR	0.0573
Goodness of Fit Index (GFI)	0.870
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)	0.810
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI)	0.595



**LAMPIRAN 1.3 Hasil Pengujian LISREL**

Total Sample Size(N) = 120

Univariate Summary Statistics for Continuous Variables

Variable Mean St. Dev. Skewness Kurtosis Minimum Freq. Maximum Freq.

Variable	Mean	St. Dev.	Skewness	Kurtosis	Minimum	Freq.	Maximum	Freq.
X1	4.333	0.626	-0.595	0.499	2.000	1	5.000	49
X2	4.425	0.644	-1.444	5.272	1.000	1	5.000	58
X3	4.325	0.663	-1.176	3.993	1.000	1	5.000	49
X4	4.583	0.544	-1.136	2.200	2.000	1	5.000	72
X5	4.433	0.546	-0.518	1.193	2.000	1	5.000	54
X6	4.508	0.518	-0.218	-1.536	3.000	1	5.000	62
X7	4.333	0.714	-1.435	4.049	1.000	1	5.000	52
X8	4.225	0.783	-1.275	2.594	1.000	1	5.000	46
X9	4.158	0.778	-1.265	2.724	1.000	1	5.000	39
Y1	4.275	0.673	-0.728	0.815	2.000	2	5.000	46
Y2	4.183	0.722	-1.110	2.958	1.000	1	5.000	39
Y3	4.450	0.606	-0.612	-0.544	3.000	7	5.000	61
Y4	4.000	0.987	-0.906	0.346	1.000	2	5.000	43
Y5	4.292	0.738	-0.780	0.138	2.000	2	5.000	53
Y6	4.058	0.938	-1.238	1.713	1.000	3	5.000	41

LISREL Estimates (Robust Maximum Likelihood)

LAMBDA-Y

	TRUST	PART
Y1	1.000	--
Y2	1.361 (0.195) 6.962	--
Y3	0.870 (0.147) 5.905	--
Y4	--	1.000
Y5	--	0.555 (0.070) 7.893

Y6    --    1.007  
           (0.153)  
           6.588

## LAMBDA-X

	PI	AKUN	TRANS
	-----	-----	-----
X1	1.000	--	--
X2	1.367 (0.260) 5.258	--	--
X3	1.331 (0.256) 5.201	--	--
X4	--	1.000	--
X5	--	1.041 (0.092) 11.274	--
X6	--	0.695 (0.188) 3.693	--
X7	--	--	1.000
X8	--	--	1.200 (0.126) 9.519
X9	--	--	1.073 (0.153) 7.026

## GAMMA

	PI	AKUN	TRANS
	-----	-----	-----
TRUST	0.056 (0.518)	-0.084 (0.131)	0.845 (0.393)

0.108 -0.641 2.148  
 PART 0.878 -1.234 1.291  
 (1.138) (0.541) (0.707)  
 0.771 -2.283 1.827

Covariance Matrix of ETA and KSI

	TRUST	PART	PI	AKUN	TRANS
TRUST	0.187				
PART	0.248	0.691			
PI	0.147	0.195	0.139		
AKUN	0.138	0.121	0.127	0.172	
TRANS	0.224	0.293	0.178	0.172	0.270

PHI

	PI	AKUN	TRANS
--	----	------	-------

PI	0.139 (0.024) 5.828
----	---------------------------

AKUN	0.127 (0.036) 3.540	0.172 (0.060) 2.851
------	---------------------------	---------------------------

TRANS	0.178 (0.044) 4.060	0.172 (0.072) 2.393	0.270 (0.106) 2.555
-------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

PSI

Note: This matrix is diagonal.

TRUST	PART
-------	------

0.001 (0.101) 2.868	0.291
---------------------------	-------

Squared Multiple Correlations for Structural Equations

TRUST	PART
-----	-----
0.995	0.579

NOTE: R<sup>2</sup> for Structural Equations are Hayduk's (2006) Blocked-Error R<sup>2</sup>

Squared Multiple Correlations for Reduced Form

TRUST	PART
-----	-----
0.995	0.579

THETA-EPS

Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6
-----	-----	-----	-----	-----	-----
0.267	0.175	0.226	0.284	0.332	0.179
(0.042)	(0.031)	(0.033)	(0.110)	(0.054)	(0.054)
6.358	5.560	6.924	2.588	6.184	3.341

Squared Multiple Correlations for Y - Variables

Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6
-----	-----	-----	-----	-----	-----
0.412	0.664	0.385	0.709	0.391	0.796

THETA-DELTA

X1	X2	X3	X4	X5	X6
-----	-----	-----	-----	-----	-----
0.253	0.155	0.194	0.124	0.112	0.186
(0.053)	(0.030)	(0.032)	(0.022)	(0.022)	(0.028)
4.750	5.089	5.965	5.688	5.140	6.646

THETA-DELTA

X7	X8	X9
-----	-----	-----
0.240	0.224	0.294
(0.033)	(0.043)	(0.059)
7.285	5.158	4.946

Squared Multiple Correlations for X - Variables



X1	X2	X3	X4	X5	X6
0.354	0.626	0.559	0.580	0.623	0.308

Squared Multiple Correlations for X - Variables

X7	X8	X9
0.530	0.635	0.514

